



# **GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN**

**KABUPATEN SLEMAN 2016-2035**

**Bappeda Kabupaten Sleman  
2015**

## **KATA PENGANTAR**

Berbagai data kependudukan dan dinamikanya di Kabupaten Sleman merupakan petunjuk bagi gambaran tentang kebijakan pembangunan di masa depan. Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Sleman 2016 – 2035 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk telah berada pada tingkat rendah, dengan ditandai tingkat kelahiran dan kematian yang sama-sama rendah. Dalam hal ini, aspek migrasi penduduk, utamanya migrasi masuk menjadi hal penting dalam perubahan jumlah penduduk. Setidaknya terdapat tiga hal penting yang perlu dicermati. Pertama, struktur penduduk telah berada pada struktur dewasa, dengan dominasi penduduk usia produktif dan bahkan telah ada kecenderungan menuju struktur tua. Kedua, kondisi penduduk pada struktur dewasa telah mencapai fase windows of opportunity yang datangnya hanya sekali dan memberikan peluang untuk memperoleh bonus demografi. Ketiga, dinamika penduduk pada masa depan lebih ditentukan oleh faktor migrasi dari pada kelahiran dan kematian. Ketiga hal mendasar tersebut perlu menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu grand design pembangunan kependudukan untuk dijadikan arah bagi perumusan kebijakan dan program kependudukan di masa yang akan datang.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di Kabupaten Sleman. Grand design pembangunan adalah gambaran kuantitas dan kualitas penduduk pada masa kini, untuk selanjutnya diproyeksikan kondisinya pada masa depan. Terdapat lima pilar penting yang dibahas yakni pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas, dan pembangunan basis data kependudukan. Diharapkan ke depan akan terwujud penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Sleman yang maju, mandiri, sejahtera, berkelanjutan dan berbudaya. Secara operasional, grand design ini merupakan bagian integral dari pembangunan di berbagai bidang dalam rangka memerangi kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2035 dapat diselesaikan. Berbagai upaya dan kerja keras untuk terselesaikannya dokumen ini telah dilakukan. Oleh karena itu, diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen berikutnya.

Sleman, Desember 2015

Kepala Bappeda  
Kab. Sleman

Drg. Intriati Yudatiningsih, M,Kes  
NIP. 19580904 108312 2 001

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Visi.....	4
1.4 Misi .....	4
1.5 Arah Kebijakan .....	5
1.6 Rujukan .....	5
1.7 Sasaran .....	7
<b>BAB II KONSEP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN</b> .....	<b>8</b>
2.1 Kajian terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Kependudukan .....	8
2.2 Konseptualisasi Grand Design Kependudukan .....	9
2.3 Konseptualisasi Sistem Registrasi Penduduk.....	12
2.4 Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Road Map.....	17
2.4.1 Pembangunan Berwawasan kependudukan .....	17
2.4.2 Peta jalan (Road Map) .....	19
<b>BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN SLEMAN SAAT INI</b> .....	<b>20</b>
3.1 Kuantitas Penduduk .....	20
3.2 Kulaitas Penduduk .....	29
3.2.1 Pendidikan .....	29
3.2.2 Kesehatan .....	33
3.2.3 Ekonomi .....	37
3.2.3.1 Kemiskinan .....	37

3.2.3.2	Produk Domestik Regional Bruto .....	40
3.2.3.3	Inflasi .....	44
3.2.3.4	Indeks Gini .....	47
3.2.4	Ketenagakerjaan.....	47
3.2.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	50
3.2.6	Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....	52
3.2.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) .....	55
3.2.7.1	Partisipasi dalam Bidang Legislatif .....	55
3.2.7.2	Partisipasi dalam Bidang Eksekutif.....	56
3.3	Pembangunan Keluarga.....	58
3.4	Persebaran dan Mobilitas Penduduk .....	63
3.5	Data dan Informasi Kependudukan .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN .....</b>	<b>71</b>
4.1	Kuantitas Penduduk .....	71
4.2	Kualitas Penduduk.....	73
4.3	Kondisi Keluarga .....	73
4.4	Persebaran dan Mobilitas penduduk.....	74
4.5	Database Kependudukan .....	75
4.6	Permasalahan dan Tantangan.....	78
<b>BAB V</b>	<b>KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN .....</b>	<b>82</b>
5.1	Pengendalian Kuantitas Penduduk .....	82
5.2	Peningkatan Kualitas Penduduk.....	84
5.3	Pembangunan Keluarga.....	86
5.4	Pengarahannya Mobilitas Penduduk .....	89
5.5	Pembangunan Database Kependudukan .....	90
<b>BAB VI</b>	<b>ROAD MAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN .....</b>	<b>92</b>
6.1	Pengendalian Kuantitas Penduduk .....	92
6.2	Peningkatan Kualitas Penduduk.....	95
6.3	Pembangunan Keluarga.....	96
6.4	Pengarahannya Mobilitas Penduduk .....	97
6.5	Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan.....	99

<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 -2014 di Kabupaten Sleman.....	20
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2012 – 2015 di Kabupaten Sleman.....	22
Tabel 3.3	Banyaknya KK dan Rata – Rata Jiwa Dalam Keluarga Tahun 2010 – 2014 di Kabupaten Sleman.....	25
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2010-2014.....	26
Tabel 3.5	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Berdasarkan Data SIAK Tahun 2013 dan 2014 .....	27
Tabel 3.6	Persentase Penduduk Kabupaten Sleman dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY dan Daerah Tempat Tinggal 2010....	29
Tabel 3.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sleman .....	31
Tabel 3.8	APK dan APM Kabupaten Sleman tahun 2010 – 2014.....	31
Tabel 3.9	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman.....	32
Tabel 3.10	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman.....	33
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2013 dan 2014.....	34
Tabel 3.12	Indikator Kesehatan Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Sleman .....	35
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Sleman.....	36
Tabel 3.14	Persentase Kemiskinan Tahun 2008 – 2014 Kabupaten Sleman.....	38
Tabel 3.15	Sebaran Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman Tahun 2008 – 2014 .....	39
Tabel 3.16	Pertumbuhan Sektor dan PDRB 2010 – 2014 Kabupaten Sleman.....	40

Tabel 3.17	PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Th 2010 – 2014 Kabupaten Sleman.....	41
Tabel 3.18	PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Sleman.....	43
Tabel 3.19	PDRB Per Kapita tahun 2010- 2014 Kabupaten Sleman.....	44
Tabel 3.20	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Sleman ...	46
Tabel 3.21	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010 -2014 Kabupaten Sleman.....	46
Tabel 3.22	Indeks Gini Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman.....	47
Tabel 3.23	Penduduk Angkatan Kerja Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman.....	48
Tabel 3.24	Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014 Kabupaten Sleman .....	49
Tabel 3.25	Perkembangan Ketenagakerjaan tahun 2011-2014 Kabupaten Sleman.....	50
Tabel 3.26	Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Sleman Tahun 2010-2014 *) .....	51
Tabel 3.27	Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014.....	53
Tabel 3.28	Indeks Pembangunan Gender (IPG) D.I. Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2014 .....	54
Tabel 3.29	Capaian IPM dan IPG di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2014 ....	55
Tabel 3.30	Banyaknya Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman Tahun 2009-2014 dan 2014-2019 .....	55
Tabel 3.31	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Sleman menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 dan 2013 .....	56
Tabel 3.32	Jumlah Pejabat menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman Tahun 2014.....	57

Tabel 3.33	Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Keluarga di Kabupaten Sleman Tahun 2014 .....	61
Tabel 3.34	Persentase Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Keluarga di Kabupaten Sleman Tahun 2014 .....	62
Tabel 3.35	Migrasi Bersih Kabupaten Sleman, 2013 dan 2014 .....	63
Tabel 6.1	<i>Road Map</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2015-2035*) .....	94
Tabel 6.2	<i>Road Map</i> Indikator Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2035*) .....	95
Tabel 6.3	Roadmap Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2015-2035*) .....	96
Tabel 6.4	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Ekonomi Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2015-2035*) .....	96
Tabel 6.5	<i>Roadmap</i> Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sleman Tahun 2015- 2035 .....	97
Tabel 6.6	<i>Roadmap</i> Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2015- 2035 .....	98
Tabel 6.7	<i>Roadmap</i> Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan .....	99

## **DAFTAR GAMBAR**

1.	Skema Tujuan Pembangunan Kependudukan Sleman .....	7
2.	Peta kepadatan penduduk DIY Tahun 2010 .....	28
3.	Perkembangan IPG Kabupaten Sleman Tahun 2012-2014 .....	53
4.	Data Dasar (Database) Kependudukan di Indonesia .....	66

## Intisari

Kedudukan penduduk dalam pembangunan adalah sangat penting, selain sebagai pelaku pembangunan juga merupakan sasaran dari hasil pembangunan. Amanat Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pembangunan basis data kependudukan.

Hasil pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman telah berhasil mewujudkan struktur penduduk seimbang, ditandai dengan TFR yang rendah, di bawah angka 2,1 kelahiran tiap 1000 wanita usia subur. Angka TFR tersebut ideal yang memungkinkan tercapainya momentum demografi berupa kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Inilah yang disebut dengan *demographic deviden* yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Penduduk pada fase ini betul-betul menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan. Pedoman pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman pada 2015 – 2035 dituangkan dalam bentuk *Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kabupaten Sleman* yang memuat kebijakan dan program operasional baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Visi dari GDPK adalah terwujudnya penduduk berkualitas untuk mencapai Kabupaten Sleman yang maju, mandiri, sejahtera, berkelanjutan, dan berbudaya. Untuk mewujudkannya, ada beberapa misi yang dicanangkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Penduduk di Kabupaten Sleman yang maju, berkualitas, mandiri, sejahtera, berkelanjutan, berbudaya dan Sembada
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan yang terintegrasi, selaras, dan berkesinambungan ;

3. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam kondisi kondisi penduduk tumbuh seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.
4. Membangun komitmen pemangku kepentingan utama (*prime stakeholders*) terhadap upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan berkelanjutan

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, berbagai kebijakan disusun secara terpadu dan berkesinambungan. Arah kebijakan pokok yang dilakukan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut.

1. Mengelola pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angkakelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga miskin dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
4. Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan.
6. Melaksanakan pembangunan kependudukan melalui sistem administrasi kependudukan yang modern, maju, transparan, dan terkendali

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman adalah yang tertinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah dengan melakukan revitalisasi program pengendalian penduduk seperti Program Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga, dan Penanganan Mobilitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah: memperkuat kelembagaan di Kabupaten Sleman, menyediakan sumber daya manusia (SDM) program yang memadai, terutama di tingkat lini lapangan, serta menyediakan sarana, prasarana, dan anggaran yang juga mencukupi. Salah satu sasarannya adalah meningkatkan pencapaian program seperti tertuang dalam *road map* setiap periode, termasuk dalam rangka memperkecil disparitas antara perdesaan dan perkotaan (wilayah perbatasan dengan kota).

Potensi Bonus Demografi akan berlangsung sejak tahun 2015 dan terus berlanjut hingga 2035. Bonus demografi tersebut mencapai puncaknya pada periode 2020-2025 yakni fase jendela peluang (*window of opportunity*). Pada periode tersebut angka ketergantungan menjadi terendah sepanjang masa, yaitu sebesar 43 persen. Untuk mengantisipasi "*window of opportunity*" ini maka kebijakan yang perlu diambil adalah penyediaan lapangan kerja, peningkatan ketrampilan dan kualitas SDM, serta mempersiapkan kaum perempuan untuk memasuki angkatan kerja. Hal yang penting untuk diperhatikan pula terkait dengan fase Bonus Demografi adalah tingginya jumlah penduduk pada kategori remaja. Implikasi kebijakan yang perlu diambil berkaitan dengan jumlah remaja yang besar ini adalah menyiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu kualitas, baik yang menyangkut pendidikan maupun kesehatannya (termasuk kesehatan reproduksinya) harus memperoleh perhatian yang serius.

Selain persentase penduduk usia kerja dan remaja yang besar, kelompok penduduk usia 60 tahun keatas juga meningkat secara signifikan. Fenomena "*aging population*" di Sleman telah terjadi dan menjadi masalah utama sebagaimana dihadapi di negara-negara maju. Proporsi kelompok ini cenderung meningkat, telah mencapai 10,5 persen pada 2015 dan terus meningkat

menjadi sekitar 15,5 persen pada 2035. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah upaya-upaya untuk kaum lansia ini dapat hidup lebih sejahtera, melalui antara lain pelayanan program-program dan kegiatan yang lebih ramah lansia.

Berdasarkan aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta saja. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan prosesnya dapat terjadi di semua arah, di semua kecamatan. Patut disadari bahwa beberapa kecamatan yang berada di lereng Gunung Merapi memiliki tingkat urbanisasi yang rendah.

Pembangunan kependudukan dari sisi kuantitas telah pula selaras dengan pembangunan kualitas penduduk baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, dan mental spiritual. Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berbagai arahan kebijakan pembangunan kependudukan telah dituangkan dalam GDPK Kabupaten Sleman 2015 – 2035. Namun demikian, tantangan besar persoalan kependudukan di Kabupaten Sleman adalah laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingkat migrasi masuk yang pesat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi yang belum optimal. Penting untuk mewujudkan keselarasan potensi bonus demografi dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Kunci utama untuk mewujudkannya terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan.

# **GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SLEMAN 2016-2035**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Penduduk adalah modal dasar pembangunan, juga merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali, diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi ter kendalinya jumlah, laju pertumbuhan, dan kualitas penduduk. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dua komponen pokok kependudukan yang penting dikaji adalah proses kependudukan dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup aspek kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan mencakup aspek komposisi antara lain komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Hasil dari dua komponen baik proses maupun struktur adalah dasar bagi proses pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Kabupaten Sleman dengan struktur penduduk seimbang, ditandai dengan TFR yang rendah, di bawah angka 2,1 akan mencapai momentum demografi berupa kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Inilah yang disebut dengan *demographic dividen* yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Penduduk pada fase ini betul-betul menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Pertanyaan besar adalah kapan dan bagaimana mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang tersebut. Oleh karenanya, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk pelaksanaannya diperlukan suatu Grand Design atau rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk agar kondisi penduduk tumbuh seimbang segera terwujud.

Hal pokok yang perlu dikondisikan agar struktur penduduk tumbuh seimbang dapat terwujud adalah kepedulian semua pihak, baik unsur pemerintah, sektor swasta, maupun unsur masyarakat. Melalui kerja keras, terintegrasi, dan berkesinambungan sejalan dengan semangat otonomi daerah, implementasi prinsip "Pembangunan Berwawasan Kependudukan" secara konsisten dan berkelanjutan merupakan paradigma yang tidak dapat ditawar lagi. Lebih dari itu, dengan menggabungkan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, telah memberikan gambar bahwa aspek-aspek kependudukan beserta matranya dan lingkungan hidup, maka ke depan perlu digaungkan prinsip "Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan".

Sebagai simpulan, diperlukan suatu rencana besar yang memuat kebijakan dan program operasional baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang mampu menjadi dasar dan tolok ukur pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman. Prinsip Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan adalah paradigma dari

rencana besar yang disusun tersebut. Untuk itu, perlu dibuat rancangan induk pembangunan kependudukan dalam bentuk *Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sleman*". Arah dan target capaian pengendalian kuantitas penduduk adalah pilar utama dalam rancangan induk tersebut.

## **1 . 2 . D a s a r H u k u m**

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Sleman adalah sebagai berikut.

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945(Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34)
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
- c) Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- e) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
- g) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- h) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
- i) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- j) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
- k) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
- l) Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

- m) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- n) Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- o) Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- p) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
- q) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
- r) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
- s) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan
- t) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 - 2019

### **1 . 3 . V i s i**

Terwujudnya penduduk berkualitas untuk mencapai Kabupaten Sleman yang maju, mandiri, sejahtera, berkelanjutan, dan berbudaya.

### **1 . 4 . M i s i**

1. Mewujudkan Penduduk di Kabupaten Sleman yang maju, berkualitas, mandiri, sejahtera, berkelanjutan, berbudaya dan Sembada.
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan yang terintegrasi, selaras, dan berkesinambungan .
3. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam kondisi kondisi penduduk tumbuh seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.

4. Membangun komitmen pemangku kepentingan utama (*prime stakeholders*) terhadap upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan berkelanjutan.

### **1.5. Arah Kebijakan**

1. Mengelola pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga miskin dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
4. Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan.
6. Melaksanakan pembangunan kependudukan melalui sistem administrasi kependudukan yang modern, maju, transparan, dan terkendali

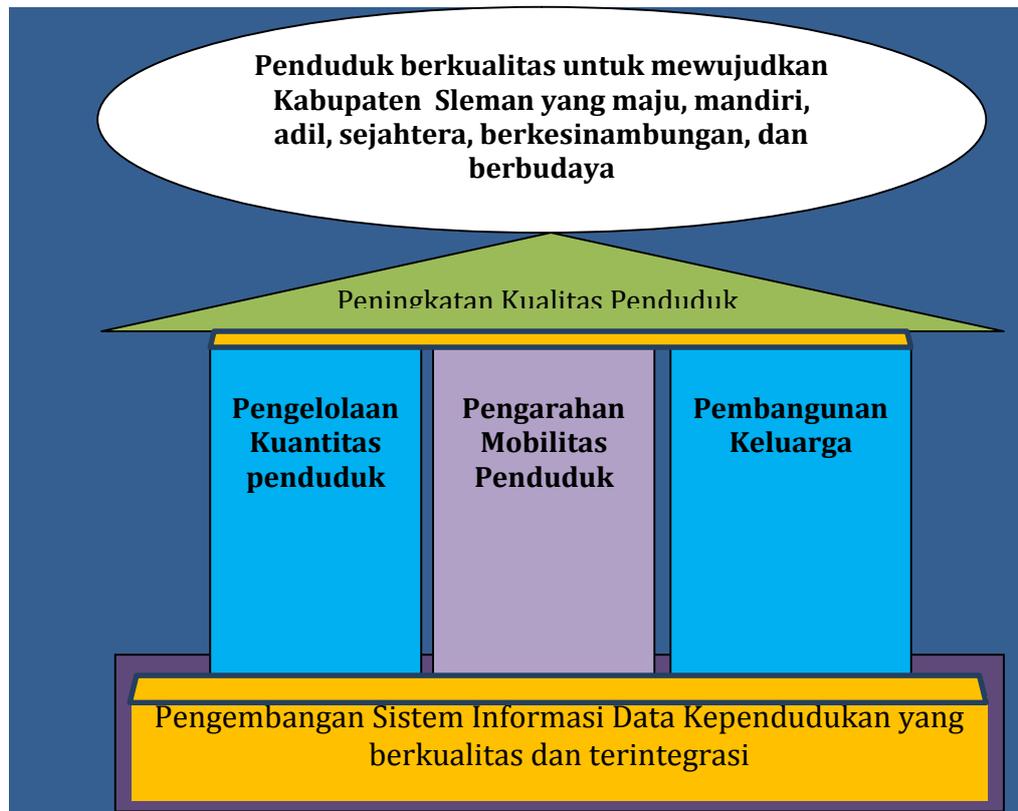
### **1.6. Tujuan**

1. Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi untuk mencapai Sleman yang maju, mandiri, adil,

sejahtera, berkelanjutan, dan berbudaya. Tujuan umum tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus sebagai berikut.

- a. mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk
  - b. mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengelolaan urbanisasi
  - c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga
2. Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan

Secara konseptual, tujuan pembangunan kependudukan Sleman selama 2015-2035 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Skema Tujuan Pembangunan Kependudukan Sleman Selama 2015-2035

## 1.7. Sasaran

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan
2. Pencapaian bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan produktivitas
3. Terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, dan berbudaya tinggi
4. Pembangunan *database* kependudukan di Kabupaten Sleman melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi

## **BAB II**

# **KONSEP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**

### **2.1. Kajian terhadap Undang - Undang Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Kependudukan**

Perkembangan kondisi kependudukan di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan di Indonesia selama ini dapat dikatakan berhasil. Indikasinya sangat jelas yakni adanya penurunan angka fertilitas total dan angka kematian bayi. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan angka pertumbuhan penduduk. Hampir semua parameter tersebut yakni angka kelahiran dan kematian bayi diperoleh secara tidak langsung atau estimasi karena sistem registrasi yang ada belum dapat berjalan dengan baik.

Keberhasilan kebijakan kependudukan tersebut ternyata masih menyisakan permasalahan lain yang sangat penting yaitu kualitas data registrasi penduduk yang kurang baik. Penelitian Kasto (1974), Tukiran (1989), Poedjastuti (1989), Raharjo (1990), Siswidiyanto (1992), dan Fakultas Geografi UGM (2000) yang dilakukan diberbagai wilayah menunjukkan bahwa cakupan pencatatan kelahiran, kematian, migrasi maupun jumlah penduduk masih berkisar 60-70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data registrasi penduduk masih rendah.

Keadaan ini menyebabkan hampir seluruh perhitungan dan analisis demografi tidak menggunakan data registrasi penduduk sebagai sumber datanya. Padahal secara teoritis data registrasi penduduk seharusnya menjadi sumber data yang utama dalam analisis demografi maupun perencanaan kependudukan. Dengan demikian ada kondisi yang sangat kontradiktif antara

pemahaman secara teoritis mengenai keberadaan data registrasi penduduk dengan pemanfaatannya.

Ada beberapa alasan mengapa data registrasi penduduk sangat penting.

1. Registrasi penduduk merupakan satu-satunya sumber data yang pengumpulannya secara sensus dari seluruh peristiwa yang bersifat kontinyu sehingga dinamika kependudukan dapat dikaji setiap waktu. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan survei nasional yang dalam banyak kasus dilakukan setiap tahun misalnya Susenas dan Sakernas atau tiga tahun seperti Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia dengan model survei sample yang jumlahnya terbatas.
2. Data demografi yang terkait dengan kejadian vital yang berasal dari registrasi penduduk bersifat langsung dan sangat lengkap. Hal ini selain bermanfaat untuk melakukan pengukuran demografis secara langsung, juga akan membantu pemerintah atau akademisi untuk memahami setiap perubahan angka demografi dan dapat digunakan untuk perumusan kebijakan lebih lanjut.
3. Cakupan data registrasi penduduk bersifat multi level sejak tingkat nasional sampai dengan tingkat desa. Bahkan untuk keperluan tertentu dapat direpresentasikan dalam level yang lebih rendah dari desa. Pada akhirnya dengan kelebihan-kelebihan tersebut data registrasi merupakan data yang paling dibutuhkan untuk perencanaan kependudukan dan pembangunan.

## **2.2. Konseptualisasi Grand Design Kependudukan**

Penduduk mempunyai tiga matra pokok, yaitu aspek kuantitas, kualitas, serta mobilitas penduduk. Di samping ketiga matra ini, ada aspek pendukung yang tidak kurang pentingnya antara lain adalah.

1. Masalah administrasi kependudukan. Di Indonesia, ke empat aspek kependudukan ini masih menghadapi kendala dan tantangan yang

cukup berat. Dari sisi kuantitas, penduduk Indonesia berjumlah sangat besar, yaitu nomor empat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dewasa ini penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 240 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yaitu sekitar 1,49 persen per tahun sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 yang lalu.

2. Kualitas penduduk yang relatif masih rendah. Kualitas penduduk yang masih rendah ini ditandai antara lain dengan angka kematian yang masih tinggi, pendidikan yang rendah, angka kemiskinan yang masih besar jumlahnya, serta secara umum Indeks Pembangunan Manusia yang masih ditataran bawah.
3. Masalah persebaran penduduk. Penduduk Indonesia persebarannya sangat tidak merata. Sekitar 58 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa dan Madura yang luas areanya hanya sekitar 7 persen dari luas Indonesia. Jumlah penduduk yang tidak merata dan berjejal di suatu wilayah akan memberikan beban yang berat bagi wilayah yang bersangkutan termasuk masalah lingkungan (environmental stress) seperti kerusakan hutan (termasuk bakau), kerusakan terumbu karang, masalah air bersih (water management), sampah, terumbu karang, pendangkalan sungai, serta polusi udara yang parah.
4. Masalah data, informasi, dan administrasi kependudukan. Dari sisi data, informasi dan administrasi kependudukan nampaknya masih banyak masalah yang perlu dibenahi. Kartu tanda penduduk (KTP) dan pencatatan atau registrasi penduduk berkenaan dengan kelahiran, kematian, kedatangan, dan kepergian belum bisa dilakukan dengan tertib, disiplin, serta cermat sesuai ketentuan.

Di sisi lain, penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan dengan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan.

Sebaliknya keberhasilan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mengembangkan kualitas penduduk akan memperbaiki segala segi pembangunan dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); dan bukan oleh melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA). Negara-negara maju saat ini pada umumnya tidak mempunyai SDA yang memadai tapi mempunyai SDM yang tangguh. Sebaliknya banyak negara berkembang (termasuk Indonesia) mempunyai SDM yang melimpah, tapi tanpa diimbangi dengan SDM yang baik, tetap tertinggal dari negara-negara yang sudah berkembang.

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang mengemuka, maka diperlukan suatu acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, baik dari sisi kebijakan umum dalam bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) maupun pencapaian target atau sasaran dalam bentuk *Roadmap* Pembangunan Kependudukan (RPK). Kedua aspek ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Mendasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 27 Tahun 2011 tentang penyusunan *Grand Design* terkait Pembangunan Kependudukan, maka terdapat lima bidang yang akan menjadi kajian yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk
3. Bidang Pembangunan Keluarga
4. Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk
5. Bidang Pembangunan Database Kependudukan

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Sleman merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan

kependudukan Indonesia dengan melihat target pencapaian sampai dengan tahun 2035. Dokumen mencakup kelima bidang pembangunan dengan dicantumkan pula *roadmap* yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2035 sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas langkah-langkah yang perlu diambil.

### **2.3. Konseptualisasi Sistem Registrasi Penduduk**

Data yang menyangkut penduduk dengan berbagai karakteristiknya merupakan salah satu data pokok yang amat diperlukan untuk perencanaan pembangunan di segala bidang, misalnya: kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan lain-lain. Setiap bidang pembangunan membutuhkan karakteristik pokok penduduk yang rinci seperti : susunan umur, persebaran penduduk, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah barang tentu harus tersedia data penduduk secara kesinambungan, tepat waktu, akurat dan sederet persyaratan lain melalui pengumpulan data dari berbagai sumber.

Registrasi Penduduk merupakan pencatatan yang terus menerus mengenai kejadian vital (*vital events*) yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan. Registrasi penduduk yang utamanya didasarkan pada Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1977 ini yang dimaksud untuk membangun suatu sistem pencatatan penduduk yang berlaku menyeluruh dan seragam di wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui kewajiban menggunakan Kartu Keluarga, Kartu Penduduk, dan pelaporan dari setiap kejadian vital pada lingkup keluarga bersangkutan. Pada Registrasi penduduk ini boleh dikatakan bahwa konsep yang diterapkan adalah konsep *de jure*, dalam arti penduduk akan dicatat secara resmi apabila ia telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi penduduk suatu wilayah/daerah pendaftaran di kelurahan. Tingkat cakupan data penduduk yang diperoleh akan sangat tergantung kepada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital

(kelahiran, kematian dan perpindahan) yang terjadi di dalam keluarga. Di negara-negara maju, pengumpulan data penduduk melalui registrasi ini umumnya tidak banyak menemui masalah dan hambatan. Sebaliknya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya data yang dicakup masih "*under reported*" dan tidak cukup rinci serta kualitasnya kurang memadai untuk berbagai analisis kependudukan, sehingga tidak dapat dielakkan lagi pada umumnya para ahli kependudukan masih mendasarkan analisisnya pada angka hasil Sensus Penduduk atau Survei di bidang kependudukan. Diharapkan dengan penerangan yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan kejadian vital yang terjadi di rumah tangganya, keterbukaan dan penyempurnaan pelayanan, serta mungkin penyempurnaan berbagai peraturan yang selama ini ada akan memberikan hasil pencatatan penduduk yang lebih baik. Data yang dihasilkan akan dapat digunakan sebagai pembanding dan pelengkap series data kependudukan, baik dari hasil survei maupun sensus.

Keterbukaan informasi publik adalah bentuk perubahan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan transparan sesuai dinamika masyarakat. Institusi publik terutama pemerintah harus membuka dirinya agar sesuai dengan amanat konstitusi. Dimana dalam UUD RI Tahun 1945 (amandemen) pasal 28 F disebutkan bahwa "*Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Hal itu menunjukkan konstitusi telah memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi. Konsekwensinya institusi pemerintah harus mampu menyediakan informasi yang dapat di akses oleh publik. Ketersediaan data dan informasi khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan. Sejalan dengan hal itu, perkembangan kependudukan dan pembangunan dapat berhasil jika pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional atau daerah dapat berjalan

dengan baik. Data kependudukan yang diolah dengan baik dan sistematis akan menjadi informasi yang berguna untuk menunjang pembangunan kependudukan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk*". Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan ps 58 ayat 4 UU Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- ✓ pelayanan publik;
- ✓ perencanaan pembangunan;
- ✓ alokasi anggaran;
- ✓ pembangunan demokrasi; dan
- ✓ penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Data Kependudukan tersebut bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang terintegrasi dalam SIAK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 memberikan kedudukan data kependudukan merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

Data kependudukan meliputi data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam SIAK. Ketersediaan Data penduduk dalam SIAK menyangkut dua aspek boleh dan tidak boleh di publikasikan atau diberikan kepada publik atau

lembaga tertentu karena peraturan perundangan yang berlaku. Data yang dapat diakses secara umum oleh publik adalah data agregat. Data yang terbatas dapat diakses oleh lembaga tertentu dengan persyaratan tertentu adalah data yang menyangkut data pribadi penduduk.

Data Administrasi Kependudukan yang tidak boleh dipublikasikan adalah data pribadi penduduk karena berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V. Informasi Yang Dikecualikan pasal 17. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi pemohon informasi Publik kecuali, diantaranya butir (g). Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang. Lebih lanjut di butir (h). Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

- riwayat dan kondisi anggota keluarga;
- riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
- kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau;
- catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non formal.

Dalam UU Nomor 34 tahun 2013, pasal 84 ayat 1. Menyatakan bahwa Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

- keterangan tentang cacat fisik dan/ atau mental;
- sidik jari;
- iris mata;
- tanda tangan; dan

- elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Data pribadi merupakan data yang dikecualikan untuk dipublikasikan karena menyangkut data perseorangan tertentu, maka pemerintah dalam hal itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyimpanan, perawatan dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Pemanfaatan data pribadi penduduk hanya dapat diakses setelah mendapatkan izin untuk mengakses dari Menteri Dalam Negeri.( PP 37/2007). Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sudah 22 Kementerian/Lembaga yang telah menjallin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaatan data kependudukan tersebut, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kepolisian Republik Indonesia, BNP2TKI, TNP2K, Bank Indonesia, PPATK, PT Jamsostek, PT Askes, Ditjen Pajak, Deputi Setwapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan, Bareskrim Polri, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Sekjen Kementerian Kesehatan dan Sekretaris Utama BNP2TKI.

Bagi lembaga yang telah melakukan kerjasama secara nasional, dalam pemanfaatan data kependudukan langsung mengakses dengan lembaga, kementrian/non kementrian induk, tidak perlu dengan Disdukcapil kabupaten/kota karena data telah dibuka dan terintegrasi sesuai cakupan perjanjian kerjasama.

## **2.4. Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Road Map**

### **2.4.1. Pembangunan Berwawasan Kependudukan**

Grand design pembangunan kependudukan ini erat kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan. Penduduk adalah sekaligus subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek, penduduk adalah pelaku pembangunan itu sendiri, sedangkan sebagai obyek penduduk adalah penikmat hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukannya. Tujuan penduduk sebagai subyek atau pelaku pembangunan adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; sedangkan penduduk selaku obyek atau penikmat hasil pembangunan berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi yang berhasil seharusnya mempunyai dampak yang besar bagi pembangunan sosial yang selanjutnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk. Di sisi lain, pembangunan yang dirancang haruslah pembangunan yang “*population-responsive*”, yaitu pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan. Kebijakan pembangunan yang responsif kependudukan (*population-responsive policy*) antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

#### **(a) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Kabupaten Sleman jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, paling tinggi di DIY. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah dengan melakukan revitalisasi program pengendalian penduduk seperti Program Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga, dan Penanganan Mobilitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah: memperkuat kelembagaan di Kabupaten Sleman, menyediakan sumber daya manusia (SDM) program yang memadai, terutama di tingkat lini lapangan, serta menyediakan sarana, prasarana, dan anggaran yang juga mencukupi. Salah satu sasarannya adalah meningkatkan

pencapaian program seperti tertuang dalam *road map* setiap periode, termasuk dalam rangka memperkecil disparitas antara perdesaan dan perkotaan (wilayah perbatasan dengan kota).

### **(b) Jumlah Penduduk Usia Kerja**

Seperti tercermin dari hasil sensus 2010 dan data SIAK, jumlah penduduk usia produktif paling besar dibandingkan penduduk usia anak-anak dan lansia. Jumlah angkatan kerja yang besar ini sekaligus sebagai tantangan dan peluang bagi pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana sebaliknya tantangan ini bisa menjadi peluang pembangunan ekonomi yang luar biasa apabila dapat diantisipasi dengan baik. Salah satu implikasi kebijakannya adalah penyediaan lapangan kerja melalui investasi dan peningkatan produktivitas.

Dalam ilmu demografi angkatan kerja yang luar biasa besar ini dikenal sebagai *demographic bonus*, karena pada kondisi tersebut angka beban ketergantungan menjadi minimal. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Sleman, potensi Bonus Demografi akan berlangsung sejak tahun 2015 dan terus berlanjut hingga 2035. Bonus demografi tersebut mencapai puncaknya pada periode 2020-2025 yakni fase jendela peluang (*window of opportunity*). Pada periode tersebut angka ketergantungan menjadi terendah sepanjang masa, yaitu sebesar 43 persen. Untuk mengantisipasi "*window of opportunity*" ini maka kebijakan yang perlu diambil adalah penyediaan lapangan kerja, peningkatan ketrampilan dan kualitas SDM, serta mempersiapkan kaum perempuan untuk memasuki angkatan kerja.

### **(c) Jumlah Kelompok Penduduk Usia Remaja**

Di samping penduduk usia kerja, jumlah penduduk yang termasuk kategori remaja (*adolescents*) juga besar. Hal ini disebabkan karena fertilitas yang tinggi di masa lalu, dan sampai saat ini belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Implikasi kebijakan yang perlu diambil berkaitan dengan jumlah remaja yang besar ini adalah menyiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu kualitas, baik yang menyangkut pendidikan maupun

kesehatannya (termasuk kesehatan reproduksinya) harus memperoleh perhatian yang serius.

#### **(d) Jumlah Penduduk Lanjut Usia**

Di samping penduduk usia kerja dan remaja yang besar, kelompok penduduk usia 60 tahun keatas juga meningkat secara signifikan. Fenomena “*aging population*” di Sleman telah terjadi dan menjadi masalah utama sebagaimana dihadapi di negara-negara maju. Proporsi kelompok ini cenderung meningkat, telah mencapai 10,5 persen pada 2015 dan terus meningkat menjadi sekitar 15,5 persen pada 2035. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah upaya-upaya untuk kaum lansia ini dapat hidup lebih sejahtera, melalui antara lain pelayanan program-program dan kegiatan yang lebih ramah lansia.

Di samping harus merujuk dan menjawab dinamika dan tren kependudukan yang ada (*population-responsive*), kebijakan pembangunan harus juga “*population-influencing*”, yaitu kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk membentuk dinamika dan struktur penduduk seperti yang diinginkan. Sebagai contoh: dari sisi kuantitas, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup besar dengan struktur penduduk yang masih muda. Kebijakan pembangunan yang “*population - influencing*” adalah melakukan revitalisasi program Keluarga berencana agar laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan dan struktur penduduk menjadi lebih stabil.

#### **2.4.2. Peta Jalan (Road Map)**

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Sleman ini mencakup kurun waktu 2015 sampai dengan 2035. Pada setiap periode lima tahun dari tahun 2015 akan dibuat semacam road map untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pembangunan kependudukan yang mencakup pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas, dan pembangunan basis data kependudukan telah dapat dicapai. Dengan demikian tujuan dari road map ini adalah agar secara sistematis dan terencana diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

# BAB III

## KONDISI KEPENDUDUKAN SLEMAN SAAT INI

### 3.1 Kuantitas Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman (data SIAK) dari tahun 2010-2011, jumlah penduduk Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Sleman tercatat hampir 1.093.110 jiwa dan naik menjadi 1.126.88 jiwa pada tahun 2011. Jumlah penduduk tersebut naik menjadi 1.136.602 pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 mencapai 1.059.383 jiwa. Namun mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2014 mencapai sebesar 1.062.801 jiwa. Perubahan jumlah penduduk tersebut berkaitan dengan pembersihan data hasil SIAK yang dilakukan mulai tahun 2013.

**Tabel 3.1**  
**Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**Tahun 2010-2014 di Kabupaten Sleman**

No	Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2010	547.885	50,12	545.225	49,88	1.093.110
2	2011	560.146	49,70	566.742	50,30	1.126.888
3	2012	564.998	49.71	371.624	50.29	1.166.602
4	2013	531.678	50.70	527.705	49.81	1.059.383
5	2014	539.731	50.78	523.070	49.22	1.062.801

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Database SIAK Hasil Konsolidasi dan Pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri  
Semester I Tahun 2014

Data jumlah penduduk di Kabupaten Sleman berdasarkan hasil SIAK dari tahun 2012-2014, menunjukkan pola yang tidak stabil. Pada tahun 2012 jumlah penduduk mencapai 1.136.602 turun menjadi 1.059.383 pada tahun 2013. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 1.063.448 di tahun 2014. Pengelompokan penduduk dapat digunakan sebagai dasar dalam menggambarkan kondisi demografis suatu wilayah. Umur penduduk dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) umur 0-14 tahun: usia muda/usia belum produktif, 2) umur 15-64 tahun: usia dewasa/usia produktif, dan 3) umur 65 tahun keatas: usia tua/usia tidak produktif. Struktur penduduk tersebut dapat digunakan sebagai dasar penghitungan rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

*Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio ketergantungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk yang produktif dengan penduduk yang belum/tidak produktif. Semakin tinggi angka *dependency ratio* menunjukkan semakin besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif. Sementara itu, angka *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum/tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar.

Data SIAK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur belum produktif yaitu 0-14 tahun di Kabupaten Sleman sebanyak 225.805 jiwa pada tahun 2013 atau 21,56 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 223.724 jiwa atau 21,04 persen dari total penduduk, kemudian naik lagi pada 2015 menjadi 234.629 jiwa atau 22,05 persen dari total penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas penduduk terutama pada periode 2014 – 2015 mengalami kenaikan.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**  
**Tahun 2013-2015 di Kabupaten Sleman**

Kelompok Umur	2013	2014	2015
0-4	67.179	65.321	70.539
5-9	77.999	77.739	79.775
10-14	80.627	80.664	84.315
15-19	74.849	73.148	74.303
20-24	74.457	69.464	70.711
25-29	75.480	70.746	70.510
30-34	89.905	88.387	87.697
35-39	86.924	88.354	88.597
40-44	85.061	84.216	83.636
45-49	77.322	82.322	82.136
50-54	66.005	67.787	67.484
55-59	55.873	59.337	59.217
60-64	39.321	44.334	43.903
65-69	30.178	32.312	31.026
70-74	27.499	30.145	27.685
75+	38.646	49.172	42.450
<b>JUMLAH</b>	<b>1.047.325</b>	<b>1.063.448</b>	<b>1.063.984</b>

Sumber :Dinas Kependudukan dan Cataan Sipil, 2014

Catatan: Jumlah penduduk Tahun 2015 adalah data SIAK Semester 1

Sementara itu, penduduk usia produktif antara 15-64 tahun pada tahun 2013 mencapai 725.197 jiwa atau 69,24 persentotal penduduk. Pada tahun 2014 jumlah penduduk mencapai 728.095 jiwa atau 68,47 persen dari total penduduk. Pada tahun 2015 persentase penduduk usia produktif kembali menurun menjadi 68,44 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Sleman antara 2013-2015 mengalami peningkatan sebanyak 2.997 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk usia produktif tersebut mengindikasikan terjadinya migrasi masuk ke Kabupaten Sleman. Jumlah

penduduk usia produktif ini dapat menjadi modal dasar yang sangat penting untuk berperan aktif dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Sleman.

Penduduk Kabupaten Sleman yang masuk dalam kelompok usia lanjut mencapai 96.323 jiwa pada tahun 2013 atau 9,2 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut bertambah menjadi 111.629 jiwa pada tahun 2014 atau sebesar 10,5 persen dari total penduduk. Pertambahan jumlah lansia di Kabupaten Sleman ini tergolong tinggi, karena dalam rentang waktu satu tahun yaitu 2013-2014 naik 15.306 jiwa. Kondisi ini juga menjadi indikasi akan adanya migrasi masuk ke Sleman pada kelompok usia lanjut. Jumlah dan persentase lansia pada 2015 menurun, yakni menjadi 101.161 jiwa atau 9,51 persen.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, struktur penduduk antara kelompok belum produktif, produktif, dan lanjut usia dapat digunakan sebagai dasar penghitungan rasio ketergantungan. Menurut data SIAK pada Tabel 3.2, diketahui bahwa beban ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif mencapai 44,4 persen pada tahun 2013. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun harus menanggung sekitar 44 hingga 45 orang penduduk tidak produktif. Angka ini bagus, semakin rendah beban ketergantungan maka potensi ekonomi suatu wilayah semakin baik, dengan dukungan penduduk produktif yang semakin tinggi.

Angka beban ketergantungan di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 naik menjadi 46,06 persen kemudian naik lagi pada 2015 menjadi 46,11 persen. Peningkatan ini, walau angkanya kecil, menunjukkan kecenderungan bertambahnya beban penduduk usia produktif terhadap penduduk belum/tidak produktif jika dibandingkan dengan tahun 2013. Perubahan persentase penduduk tidak produktif, utamanya bertambahnya penduduk lansia menjadi penyebab meningkatnya angka beban ketergantungan di Kabupaten Sleman.

Gambaran penduduk di Kabupaten Sleman berdasarkan rasio beban ketergantungan ini menunjukkan produktivitas sumber daya manusianya sudah cukup tinggi dan beban penduduk tidak produktif dalam pembangunan juga tergolong rendah. Dengan demikian, maka pembangunan dapat terus dilakukan karena penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh usia produktif tidak terlalu berat. Dalam istilah demografi, jika dilihat dari *dependency ratio*-nya maka telah terjadi *the window of opportunity* dimana muaranya adalah terjadinya pembangunan yang tinggi. Pada tahun 2030 diharapkan akan terjadi *window of opportunity* tersebut dengan angka ketergantungan mencapai 45-50 persen. Kondisi rasio beban ketergantungan penduduk Sleman sudah mencapai dibawah 50 yaitu 44,44 persen pada 2013, kemudian 46,05 persen pada 2014, dan 46,11 persen pada 2015.

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:

1. Keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
2. Keluarga luas (*extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orangtua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Berdasarkan data SIAK diketahui jumlah kepala keluarga (KK) dari tahun 2010-2014 menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan (Tabel

3.3). Kenaikan jumlah KK paling tinggi terjadi antara tahun 2013-2014 sebesar 14 persen. Apabila dihitung rata-rata kenaikan jumlah KK per tahun dari 2010-2014 mencapai 5,2 persen. Dari sisi jumlah anggota keluarga, banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga. Dapat diasumsikan bahwa semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga besar menjadi keluarga kecil. Dalam rentang waktu 2010-2014 terjadi pola yang tidak linier, dimana pada tahun 2010-2012 terjadi kenaikan rata-rata jumlah jiwa dalam satu keluarga. Namun dari tahun 2012-2014 rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga mengalami penurunan. Rata-rata kenaikan per tahun jumlah anggota keluarga dari 2010-2012 sebesar 6,9 persen. Sebaliknya yaitu penurunan yang terjadi antara 2012-2014 ternyata cukup besar yaitu rata-rata per tahunnya mencapai 10,6 persen.

**Tabel 3.3**  
**Banyaknya KK dan Rata-rata Jiwa Dalam Keluarga**  
**Tahun 2010-2014 di Kabupaten Sleman**

No	Jenis Data	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Banyaknya Kepala Keluarga (KK)	303.301	313.309	315.445	324.241	369.534
2	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (orang)	3,15	3,29	3,60	3,26	2,88

*Sumber :Dinas Kependudukan dan Cataan Sipil, 2014*

*Database SLAK Hasil Konsolidasi dan Pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri Semester I Tahun 2014*

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk kabupaten Sleman periode 2010-2014 menurut data BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Sleman selalu mengalami kenaikan. Meskipun jika dicermati dari tahun ke tahun kenaikan laju pertumbuhan penduduk tersebut mengalami pelambatan. Penurunan paling besar terjadi antara tahun 2010-2011 yaitu sebesar 0,56 persen, setelahnya penurunan yang terjadi relatif stabil di angka 0,05 persen.

Kondisi ini menjadi indikasi terjadinya penurunan tingkat fertilitas di Kabupaten Sleman.

**Tabel 3.4**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sleman**  
**Tahun 2010-2014**

Jenis Data	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Laju Pertumbuhan Penduduk (%/th)	1,92	1,36	1,31	1,26	1,21

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2014

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, karena perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan, sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan.

Berdasarkan karakteristik sumberdaya, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kawasan, salah satunya adalah Kawasan Tengah yaitu wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan, dan jasa, sehingga tidak mengherankan jika Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Data SIAK 2013 dan 2014 setelah dilakukan pembersihan data memperlihatkan persentase persebaran penduduk Kabupaten Sleman menurut kecamatan paling tinggi adalah Kecamatan Depok sebesar 11,7 persen terhadap total penduduk di tahun 2013. Angka tersebut mengalami sedikit kenaikan di tahun 2014 menjadi 11,9 persen dan Depok tetap tercatat sebagai kecamatan dengan persentase penduduknya tertinggi di Sleman. Wilayah dengan persentase penduduk terendah adalah Kecamatan Cangkringan mencapai 3

persen tahun 2013 dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 2,9 persen. Hal ini dimungkinkan oleh adanya migrasi penduduknya yang keluar kecamatan atau bahkan pindah kabupaten lain karena adanya dampak dari aktivitas gunung Merapi.

**Tabel 3.5**  
**Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman**  
**Berdasarkan Data SIAKTahun 2013 dan 2014**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persen Luas Wilayah	Persen Persebaran Penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	
				2013	2014	2013	2014
1.	GAMPING	29,25	5,09	8,63	8,64	3.090	3.142
2.	GODEAN	26,84	4,67	6,47	6,54	2.524	2.591
3.	MOYUDAN	27,62	4,80	3,19	3,13	1.211	1.206
4.	MINGGIR	27,27	4,74	3,24	3,23	1.244	1.260
5.	SEYEGAN	26,63	4,63	4,62	4,66	1.816	1.859
6.	MLATI	28,52	4,96	8,63	8,57	3.169	3.194
7.	DEPOK	35,55	6,18	11,67	11,94	3.437	3.571
8.	BERBAH	22,99	4,00	5,12	5,06	2.331	2.341
9.	PRAMBANAN	41,35	7,19	5,17	4,94	1.310	1.270
10.	KALASAN	35,84	6,23	7,35	7,39	2.149	2.194
11.	NGEMPLAK	35,71	6,21	5,60	5,56	1.642	1.656
12.	NGAGLIK	38,52	6,70	8,88	9,06	2.414	2.502
13.	SLEMAN	31,32	5,45	6,39	6,37	2.136	2.162
14.	TEMPEL	32,49	5,65	5,12	5,13	1.650	1.678
15.	TURI	43,09	7,50	3,45	3,40	840	839
16.	PAKEM	43,84	7,63	3,47	3,47	830	842
17.	CANGKRINGAN	47,99	8,35	3,00	2,92	656	646
<b>KABUPATEN SLEMAN</b>		<b>574,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.822</b>	<b>1.850</b>

Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri 2013 dan 2014

Kepadatan penduduk Kabupaten Sleman jika dibandingkan dengan wilayah lain di DIY menduduki posisi kedua setelah Kota Yogyakarta. Tahun 2013 kepadatan penduduk telah mencapai 1.822 jiwa per km<sup>2</sup> dan tahun 2014 meningkat menjadi 1.850 jiwa per km<sup>2</sup>. Dalam kurun waktu satu tahun telah terjadi kenaikan kepadatan penduduk sebesar 1,5 persen. Fakta tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa terjadi migrasi masuk ke Kabupaten Sleman yang cukup tinggi. Sementara itu, kepadatan penduduk menurut kecamatan

diketahui paling padat penduduknya adalah Kecamatan Depok yaitu 3.437 jiwa per km<sup>2</sup> di tahun 2013. Angka tersebut naik menjadi 3.571 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2014 atau naik sebesar 3,9 persen selama kurun waktu satu tahun. Hal yang sebaliknya yaitu kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Cangkringan yang hanya mencapai 656 jiwa per km<sup>2</sup> (2013) dan turun setahun berikutnya menjadi 646 jiwa per km<sup>2</sup> (2014).



**Gambar 3.1. Peta Kepadatan Penduduk DIY Tahun 2010**

Penduduk Sleman menurut daerah tempat tinggal, pada tahun 2010 tercatat sebanyak 91,32 persen tinggal di wilayah perkotaan, dan sisanya sebesar 8,68 persen tinggal di perdesaan. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Sleman menempati posisi kedua di DIY dari sisi persentase penduduknya yang tinggal di perkotaan setelah Kota Yogyakarta. Perkembangan perkotaan di

Kabupaten Sleman berkembang pesat pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta seperti di Kecamatan Gamping, Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan dan sebagainya. Keberadaan fasilitas pendidikan tinggi seperti UGM, UNY, UII, UMY, UPN Veteran dan perguruan tinggi lainnya telah pula mendorong pesatnya perkembangan perkotaan di Sleman.

**Tabel 3.6**  
**Persentase Penduduk Kabupaten Sleman dibandingkan dengan**  
**Kabupaten/Kota lain di DIY dan Daerah Tempat Tinggal, 2010**

Kab/Kota	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7
Kulonprogo	22,1	22,30	22,21	77,88	77,70	77,79
Bantul	83,7	83,37	83,53	16,30	16,63	16,47
Gunungkidul	9,4	9,16	9,28	90,60	90,84	90,72
<b>Sleman</b>	<b>91,5</b>	<b>91,16</b>	<b>91,32</b>	<b>8,53</b>	<b>8,84</b>	<b>8,68</b>
Yogyakarta	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>DIY</b>	<b>36,92</b>	<b>65,98</b>	<b>66,44</b>	<b>33,08</b>	<b>34,02</b>	<b>33,56</b>

Sumber: SP 2010

## 3.2 Kualitas Penduduk

### 3.2.1 Pendidikan

Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Dalam pembahasannya akan dilihat angka partisipasi sekolah, angka partisipasi sekolah murni, jumlah sekolah, jumlah murid, jumlah guru, serta ratio antara jumlah murid dan guru.

Kondisi pendidikan suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah (APS). Semakin mendekati angka 100 persen semakin bagus pencapaian partisipasi sekolah di suatu wilayah. APS merupakan gambaran proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok usia sekolah jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan data dari Dinas Dikpora Sleman dari tahun

2010-2014 menunjukkan bahwa APS di Kabupaten Sleman nilainya mencapai lebih dari 100 persen untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Sementara APS untuk jenjang SMA sederajat nilainya hanya mencapai rata-rata 62 persen dari 2010-2014. Rendahnya APS untuk jenjang SMA sederajat ini menunjukkan bahwa banyak penduduk di Sleman yang memilih untuk bersekolah di luar Sleman terutama di Kota Yogyakarta. Hal ini sangat berkaitan dengan kualitas pendidikan SMA sederajat yang lebih tinggi di Kota Yogyakarta dibandingkan dengan Sleman, sehingga lebih banyak yang memilihnya.

Secara umum tingginya APS dikarenakan perhatian pemerintah Sleman yang secara serius bertujuan meningkatkan mutu pendidikan demi menunjang sumber daya manusia yang berkualitas. Perlu menjadi catatan bahwa APS semakin menurun seiring dengan semakin naiknya jenjang pendidikan. Selain alasan untuk memilih sekolah di luar wilayah Sleman, juga disebabkan karena keterbatasan biaya (*affordability to pay*). Disamping itu, menurunnya APS pada tingkat pendidikan tinggi juga disebabkan masuknya penduduk usia sekolah ke pasar kerja untuk memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga.

Tingkat melek huruf dan rata-rata tahun sekolah adalah indikator penting yang menunjukkan kemajuan suatu wilayah dalam pencapaian tingkat pendidikan masyarakat. Kedua indikator ini telah digunakan secara internasional sebagai penentu kualitas manusia yakni sebagai indikator dalam dimensi pendidikan. Kualitas pendidikan, jika mengacu pada angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, di Kabupaten Sleman sudah bagus. Angka melek huruf pada 2013 dan 2014 telah mendekati angka 100 persen, sementara rata-rata tahun sekolah telah di atas pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun (Tabel 3.8).

**Tabel 3.7**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sleman**  
**Tahun 2010-2014**

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Angka Melek Huruf	92,61	93,94	94,53	98,03	98,31
2	Rata-rata lama Sekolah (tahun)	10,30	10,51	10,52	10,55	10,70*
3	APS SD/MI	110,45	113,17	115,42	111,77	104,43
4	APS SMP/MTs	109,72	108,18	110,81	110,52	103,19
5	APS SMA/MA/SMK	58,02	57,89	76,66	56,76	58,99

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2014

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kondisi pendidikan suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan data dari Dinas Dikpora Sleman, APK jenjang SD sederajat dari 2010-2012 menunjukkan kecenderungan kenaikan, hanya pada tahun 2013 sedikit mengalami penurunan. Namun pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan bahkan lebih tinggi dibanding kenaikan dari tahun 2010-2012. Sementara APK untuk jenjang SMP sederajat relatif fluktuatif, yaitu terjadinya kenaikan dan penurunan. Dari tahun 2010-2011 terjadi penurunan atau minus 1,56 persen. Pada tahun 2011-2012 terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,02 persen, kemudian dari 2012-2013 kembali turun mencapai minus 4,2 persen. Dalam rentang waktu 2013-2014 APK untuk SMP sederajat di Sleman mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga mencapai 2,28 persen.

**Tabel 3.8**  
**APK dan APM Kabupaten Sleman Tahun 2010-2014**

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar</b>					
	SD dan MI	116,42	116,45	116,51	114,77	116,78
	SMP dan MTs	115,48	113,68	113,70	108,93	111,41
	SMA, SMK dan MA	77,17	77,66	77,69	79,00	86,39
<b>2</b>	<b>Angka Partisipasi Murni</b>					
	SD dan MI	100,73	101,51	100,87	99,96	102,07
	SMP dan MTs	81,71	79,65	81,84	81,24	81,63
	SMA, SMK dan MA	54,03	54,04	55,11	55,16	57,73

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2010 - 2014

Untuk jenjang SMA sederajat berbeda dengan SD dan SMP, diketahui APK-nya kurang dari 100 persen. Namun dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan terjadinya kenaikan. Dari 2010-2011 terjadi kenaikan sebesar 0,63 persen, tahun 2011-2012 kembali terjadi kenaikan meskipun hanya sedikit yakni 0,04 persen. Hal yang sama terjadi dari rentang waktu 2012-2013 dan 2013-2014 juga kembali mengalami kenaikan yakni masing-masing 1,6 persen dan 9,35 persen. Pola yang sama terjadi untuk APM di Kabupaten Sleman, baik dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Kemajuan indikator pendidikan di Kabupaten Sleman di dukung oleh banyaknya fasilitas pendidikan di tingkat menengah dan tinggi. Terdapat kecenderungan jumlah sekolah pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi meningkat pada periode 2010 – 2014. Pada periode tersebut, terdapat peningkatan rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah dari 33 pada 2010 menjadi 41 pada 2014. Pada tingkat pendidikan tinggi yakni SMA peningkatan lebih tajam lagi, dari 25 pada 2010 menjadi 48 pada 2014 (Tabel 3.9). Begitu pula pada rasio guru dan murid, semakin tinggi tingkat pendidikan yakni di tingkat pendidikan SMP dan SMA terdapat kecenderungan ketersediaan guru semakin baik. Hal ini ditandai dengan rasio guru murid yang lebih kecil (Tabel 3.10).

**Tabel 3.9**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2014**  
**Kabupaten Sleman**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Rasio SD/MI	68	67	67	66	65
2	Rasio SMP/MTs	33	33	35	34	41
3	Rasio SMA/MA/SMK	25	25	25	25	48

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2010 – 2014*

**Tabel 3.10**  
**Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2014**  
**Kabupaten Sleman**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Rasio SD/MI	14	14	15	15	15
2	Rasio SMP/MTs	13	12	12	12	13
3	Rasio SMA/MA/SMK	9	9	9	9	9

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2010 - 2014*

### **3.2.2 Kesehatan**

Gambaran kesehatan Sleman dapat dilihat dari capaian indikator kesehatan dari tahun 2013-2014. Berdasarkan Data dari Dinas Kesehatan Sleman, diketahui rasio antara posyandu per satuan balita menunjukkan penurunan meskipun tidak terlalu besar. Pada 2013 rasio posyandu mencapai 41,08 persen dan sedikit mengalami penurunan menjadi 40,89. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian dari pihak Dinas Kesehatan Sleman agar lebih meningkatkan pelayanan posyandu, terutama dengan menambah jumlah posyandu agar mampu melayani balita. Sementara rasio puskesmas per satuan penduduk di Sleman menunjukkan semakin meningkatnya beban puskesmas dalam melayani penduduk. Tahun 2013 untuk setiap puskesmas harus melayani sebanyak 42.375 penduduk dan justru meningkat menjadi 42.487 penduduk di tahun 2014. Tentu saja hal ini perlu disikapi secara serius, bahwa pertumbuhan penduduk di Sleman kurang diimbangi dengan penambahan fasilitas kesehatan yaitu puskesmas. Perlu dibangun puskesmas baru agar beban puskesmas dalam melayani masyarakat tidak terlalu berat. Hal yang sama juga terjadi dengan Puskesmas Pembantu yang memiliki rasio 1:14.921 di tahun 2013 menjadi 1:15.394 di tahun 2015.

**Tabel 3.11**  
**Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2013 dan 2014**

No.	Fasilitas Kesehatan	2013	2014
1	Rasio Posyandu per satuan balita	41,08	40,89
2	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	42.375	42.487
3	Rasio Pustu per satuan penduduk	14.921	15.394
4	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	40.756	37.935
5	Rasio Dokter per satuan penduduk	1.416	2.365
6	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	969	3.096

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2015

Kondisi yang cukup baik terlihat untuk rumah sakit, dimana rasio terhadap penduduk Sleman menunjukkan kecenderungan penurunan. Jika pada 2013 setiap rumah sakit harus melayani 40.756 jiwa turun menjadi 37.935 di tahun 2014. Terdapat penambahan rumah sakit yang ada di Sleman sehingga beban setiap rumah sakit untuk melayani penduduk juga semakin berkurang. Hal yang berbeda terjadi dengan rasio dokter per satuan penduduk yang mengalami peningkatan dari 1:1.416 tahun 2013 menjadi 1:15.394 tahun 2014. Beban dokter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin bertambah seiring pertambahan penduduk. Disisi lain, penambahan jumlah dokter tidak mampu mengimbangi penambahan jumlah penduduk. Beban yang semakin berat dialami oleh tenaga medis secara keseluruhan termasuk dokter, bidan, perawat, dan mantri karena perubahannya sangat drastis. Pada 2013 rasio antara tenaga medis per satuan penduduk masih mencapai 1:969 naik sangat pesat menjadi 1:3.096 di 2014.

Indikator pokok penentu tingkat kesehatan masyarakat adalah rata-rata angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*). Telah disebutkan oleh para ahli kesehatan bahwa angka harapan hidup waktu lahir adalah angka yang menunjukkan keseluruhan kesehatan masyarakat, baik tingkat kesehatan bayi, balita, kesehatan ibu, dan kesehatan penduduk secara umum. Semakin tinggi angka harapan hidup waktu lahir, maka indikator kesehatan dasar lainnya seperti angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian maternal semakin rendah.

**Tabel 3.12**  
**Indikator Kesehatan Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman**

No	Indikator	Capaian Kabupaten Sleman				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Usia Harapan Hidup rata-rata	74,87	75,76	76,08	76,01	76,13
	▪ Laki-laki	73,04	73,14	73,46	73,50	
	▪ Perempuan	76,70	76,80	77,12	77,10	
2	Angka Kematian Bayi/1000 KH	5,78	5,25	4,70	4,6	4,65
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH	112,2	122	81,88	63,70	83,29
4	Persentase Balita Gizi Buruk	0,66	0,5	0,45	0,37	0,44
5	Universal Child Immunization/UCI (%)	100	100	100	100	100
6	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100
7	Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)	93,16	99,61	99,86	99,90	99,99
8	Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)	83	82,8	83,82	85,47	86,78
9	Cakupan penggunaan Air Bersih (%)	94,9	94,9	95,14	98,33	99,29
10	Cakupan penggunaan jamban Keluarga (%)	67,2	65,1	75,11	81,65	92,94
11	Cakupan penggunaan SPAL (%)	58,5	48,8	59,62	70,93	77,46

Sumber: Dinas Kesehatan, 2014

Tabel 3.12 menunjukkan indikator kesehatan di Kabupaten Sleman secara menyeluruh baik indikator pada tingkat individu seperti angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian maternal maupun indikator pada tingkat rumah tangga seperti rumah tangga sehat, penggunaan air bersih, dan jamban keluarga. Secara umum, tingkat kesehatan di Kabupaten Sleman berdasarkan berbagai indikator tersebut telah menunjukkan kondisi yang baik. Usia angka harapan hidup telah sangat baik, berada pada angka sekitar 75 tahun pada periode 2010 – 2014. Angka ini lebih tinggi daripada angka nasional yang berada pada angka 70 tahun, dan juga angka provinsi pada angka 73 tahun. Kondisi ini akan terus membaik, cenderung meningkat hingga mencapai sekitar 77 pada tahun 2035.

Kondisi indikator kesehatan yang lain pun sangat bagus, jauh lebih baik dari angka nasional. Angka kematian bayi telah berada pada angka yang sangat rendah, sebagaimana terjadi di negara maju, yakni pada angka di bawah 10 kematian dari 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi berada di bawah 5 yang telah dicapai sejak tahun 2012, hanya dicapai oleh negara maju di Eropa dan Amerika. Begitu pula dengan kematian maternal, angka ini yang paling sulit

untuk diturunkan. Angka kematian maternal di Kabupaten Sleman telah rendah, yakni di bawah 100 kematian setiap 100.000 kelahiran hidup. Ini merupakan angka yang rendah bahkan diperkirakan terendah dari seluruh kabupaten di Indonesia.

Indikator pada tingkat rumah tangga juga menunjukkan tingkat kesehatan yang baik. Cakupan kesehatan rumah tangga telah berada di atas angka 75 persen, yang menunjukkan tingkat kesehatan rumah tangga yang baik. Hal ini didukung dengan kualitas penggunaan air bersih yang telah tinggi, mencapai hampir 100 persen di tahun 2014. Pemanfaatan jamban keluarga pun meningkat pesat dari sekitar 67 persen pada 2010 menjadi sekitar 92 persen pada 2014. Secara umum ini semua menunjukkan tingkat kesehatan keluarga yang baik.

**Tabel 3.13**  
**Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman**

No	Indikator	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Rasio posyandu per satuan balita	51	50,8	35	41,08	40,89
2	Rasio puskesmas per satuan penduduk	43.614	40.232	44.292	42.375	42.487
	Rasio pustu per satuan penduduk	15.357	14.166	15.595	14.921	15.394
3	Rasio RS per satuan penduduk	49.561	47.895	42.588	40.756	37.935
4	Rasio dokter per satuan penduduk	896	878	1.401	1.416	2.365
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	762	898	960	969	3.096
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	93,16	99,61	99,86	99,90	99,99
7	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	100	100	100	100	100
8	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (%)	44,84	67,50	55,83	86,87	100
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (%)	100	100	100	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan kunjungan bayi (%)	92,87	98,32	88,94	96,06	92,57
13	Jumlah puskesmas (buah)	25	25	25	25	25
14	Jumlah puskesmas pembantu (buah)	71	71	71	70	69

Sumber: Dinas Kesehatan, 2014

Capaian indikator kesehatan Kabupaten Sleman antara tahun 2010 sampai tahun 2014 menunjukkan hasil yang cukup baik. Misalnya dalam cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan hampir 100 persen pada tahun 2014. Capaian lainnya yang juga sangat baik adalah cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin telah mencapai 100 persen. Hal yang perlu ditingkatkan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Sleman adalah penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah puskesmas, pusku, RS, dokter dan tenaga medis rasionya masih tinggi per satuan penduduk. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan belum bisa dilakukan secara efektif karena keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan tersebut.

### **3.2.3 Ekonomi**

#### **3.2.3.1 Kemiskinan**

Pendapatan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut ukuran bank dunia penduduk dengan pendapatan kurang dari US \$ 1,25 per hari dikategorikan sebagai penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah pendapatan penduduk kurang dari US \$ 1 per hari ini menunjukkan bahwa standar hidup penduduk yang sangat rendah.

Penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Sleman pada Tahun 2014 adalah 9,50 persen lebih kecil dibandingkan kondisi pada tahun 2013 sebesar 10,44 persen. Angka tersebut masih berada dibawah rerata nasional sebesar 13,33 persen. Angka ini sudah mencapai target MDGs nasional tahun 2015 sebesar 10,30 persen. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan kerja keras untuk menurunkannya. Kabupaten Sleman menempati urutan ke dua dari 5 Kabupaten/Kota di DIY. Kota Jogja menempati urutan pertama (8,90 persen), diikuti Sleman (9,82 persen), Bantul (16,00 persen), Gunung Kidul (21,74 persen) dan Kulonprogo (22,27 persen).

Garis kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar Rp. 306.061 per kapita per bulan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya

sebesar Rp 281.644 perkapita perbulan. Jika dilihat dari jumlah, maka jumlah penduduk miskin (penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan) pada tahun 2012 sebanyak 118,2 ribu orang. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2014 yang jumlahnya mencapai 110,8 ribu orang, berarti jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dalam setahun. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan 2014 menunjukkan tren penurunan seperti terlihat dalam Tabel 3.14.

**Tabel 3.14 Persentase Kemiskinan Tahun 2008-2014 Kabupaten Sleman**

Kecamatan	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Moyudan	20,88	22,91	19,15	17,49	16,89	16,91	14,95
Minggir	31,81	41,71	30,33	25,37	24,70	22,62	19,44
Seyegan	29,65	34,48	30,55	27,03	26,07	23,79	20,53
Godean	18,97	24,79	20,98	14,12	13,63	15,19	12,94
Gamping	14,36	22,95	15,75	12,47	12,06	11,46	10,00
Mlati	19,58	16,13	15,11	11,81	11,38	11,61	9,92
Depok	10,28	5,57	4,84	3,92	3,82	4,08	3,44
Berbah	22,91	26,62	23,12	16,37	15,79	13,08	11,07
Prambanaan	26,27	29,07	22,01	20,34	19,40	22,74	18,19
Kalasan	23,84	23,40	15,63	15,72	14,79	12,19	10,40
Ngemplak	20,78	25,46	20,31	15,59	14,76	9,59	8,39
Ngaglik	14,68	13,74	12,82	9,28	8,80	7,44	6,23
Sleman	32,49	37,27	33,07	27,15	24,92	19,31	16,53
Tempel	38,45	35,89	31,42	30,68	27,82	23,23	20,03
Turi	18,51	25,77	23,53	20,61	19,45	19,91	17,54
Pakem	15,19	15,71	12,88	10,50	9,90	10,09	8,67
Cangkringan	36,12	34,94	31,08	47,55	47,48	21,42	18,05
<b>Kab. Sleman</b>	<b>22,25</b>	<b>22,98</b>	<b>19,17</b>	<b>16,57</b>	<b>15,85</b>	<b>13,89</b>	<b>11,85</b>

Sumber Data: Badan KB, PM dan PP, 2015

Pada tabel 3.15 menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman memiliki kecenderungan penurunan dari tahun 2010-2014. Jumlah penduduk miskin dalam rentang waktu 2010-2014 turun sebesar 24,5 persen. Angka tersebut tergolong tinggi karena jumlah penduduk miskin berkurang hampir seperempatnya dalam kurun waktu empat tahun. Menurut wilayah diketahui Kecamatan Sleman memiliki jumlah penduduk miskin paling

banyak diantara kecamatan yang lain di Sleman yakni mencapai 6.521 KK di tahun 2010. Namun pada tahun 2014, jumlah KK miskin di Kecamatan Sleman tersebut turun hingga 40,7 persen menjadi 3.865 KK dan menempati posisi kedua terbanyak setelah Kecamatan Tempel. Sementara jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tempel pada tahun 2010 tercatat sebanyak 4.908 KK dan menempati urutan kedua terbanyak setelah Kecamatan Sleman. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Tempel turun sebanyak 18,6 persen menjadi 3.996 KK. Meskipun mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tempel pada tahun 2014 tersebut menempati urutan tertinggi di Kabupaten Sleman menggeser Kecamatan Sleman. Dari jumlah penduduk miskin antar kecamatan di Kabupaten Sleman terlihat angkanya selaras dengan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin memperlihatkan disparitas yang cukup tinggi antar kecamatan.

**Tabel 3.15**  
**Sebaran Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman Tahun 2008-2014**

Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Moyudan	2.004	2.307	2.068	1.896	1.864	1.821	1.770
Minggir	2.889	3.522	3.190	2.686	2.642	2.558	2.526
Seyegan	3.915	4.385	4.027	3.604	3.559	3.660	3.611
Godean	3.161	4.578	4.047	2.723	2.680	3.259	3.161
Gamping	3.038	4.087	3.990	3.291	3.209	3.175	3.105
Mlati	3.998	4.450	3.891	3.207	3.113	3.239	3.208
Depok	2.570	2.013	1.802	1.466	1.451	1.572	1.518
Berbah	3.072	3.648	3.287	2.361	2.313	2.081	2.036
Prambanaan	3.849	4.145	3.501	3.215	3.132	3.684	3.421
Kalasan	4.347	5.130	3.564	3.611	3.519	2.828	2.710
Ngemplak	2.996	3.727	3.194	2.457	2.396	1.697	1.651
Ngaglik	2.868	3.354	3.305	2.399	2.340	2.126	2.085
Sleman	5.939	7.030	6.521	5.393	5.010	3.923	3.865
Tempel	5.812	5.454	4.908	4.792	4.435	4.076	3.996
Turi	1.779	2.662	2.518	2.218	2.158	2.147	2.056
Pakem	1.479	1.635	1.348	1.078	1.078	1.145	1.113
Cangkringan	3.158	3.030	2.728	4.572	4.572	2.046	1.966
<b>Kab. Sleman</b>	<b>56.867</b>	<b>65.157</b>	<b>57.979</b>	<b>50.603</b>	<b>49.471</b>	<b>45.037</b>	<b>43.798</b>

Sumber Data: Badan KB, PM dan PP, 2015

### 3.2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto

Definisi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah *bruto* di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah *bruto* dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Tabel 3.16 memperlihatkan pertumbuhan berbagai sektor dan PDRB di Kabupaten Sleman dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Laju pertumbuhan PDRB Sleman dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar 29,4 persen. Berdasarkan sektor, jasa merupakan sektor paling stabil pertumbuhannya karena tidak pernah mengalami penurunan dari tahun 2010 (5,58) sampai tahun 2014 (7,32). Disamping itu, sektor jasa menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Sleman tahun 2014 yakni mencapai 7,32 persen. Sementara pertumbuhan sektor jasa dari 2010-2014 tercatat 31,2 persen. Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar bagi PDRB Sleman adalah Bangunan (7,19), Perdagangan, Hotel, dan Restoran (6,93), dan Listrik, Gas, dan Air Bersih (6,49).

**Tabel 3.16**  
**Pertumbuhan Sektor dan PDRB Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman**

No	Sektor	Pertumbuhan				
		2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Pertanian	-0,31	-2,26	4,11	1,46	1,75
2	Pertambangan dan Penggalian	15,24	14,35	1,45	2,20	1,33
3	Industri Pengolahan	3,05	6,35	-0,47	5,01	3,62
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4,82	4,28	6,31	6,44	6,49
5	Bangunan	6,59	6,95	6,03	7,14	7,19
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5,62	6,27	7,20	6,56	6,93
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6,51	6,61	5,56	5,84	6,35
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5,98	6,88	9,00	7,26	7,22
9	Jasa-jasa	5,58	6,64	6,85	6,65	7,32
	<b>PDRB</b>	<b>4,49</b>	<b>5,19</b>	<b>5,45</b>	<b>5,70</b>	<b>5,81</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

\*)angka sementara

Tabel 3.17 menunjukkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 tercatat Rp6.373.200.000.000,- dan naik menjadi Rp7.905.974.000.000,- pada tahun 2014 atau terjadi kenaikan sebesar 24,05 persen selama kurun waktu empat tahun. Sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi PDRB Sleman tahun 2014 adalah Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang menyumbang Rp1.864.238.000.000,- atau 23,58 persen. Sektor selanjutnya adalah Jasa-jasa yang memberikan kontribusi sebesar Rp1.447.185.000.000,- atau 18,3 persen. Sektor lainnya yang juga memberikan kontribusi cukup berarti adalah Industri Pengolahan yang menyumbangkan sebanyak Rp1.094.199.000.000 atau 13,84 persen dari total PDRB. Berikutnya adalah sektor pertanian yang menyumbang sebesar Rp1.052.252.000.000,- atau 13,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih tetap menjadi sektor unggulan dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB Sleman, meskipun mulai tergeser oleh sektor lain.

**Tabel 3.17**  
**PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman**

No	Sektor	2010		2011		2012		2013		2014*)	
		(juta Rp)	%								
1	Pertanian	1.001.698	15,72	979.024	14,60	1.019.264	14,42	1.034.154	13,84	1.052.252	13,31
2	Pertambangan dan Penggalian	33.304	0,52	38.084	0,57	38.636	0,55	39.486	0,53	40.011	0,31
3	Industri Pengolahan	950.029	14,91	1.010.358	15,07	1.005.640	14,23	1.055.973	14,13	1.094.199	13,84
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	58.768	0,92	61.282	0,91	65.150	0,92	69.343	0,93	73.843	0,93
5	Bangunan	729.456	11,45	780.153	11,64	827.196	11,70	886.231	11,86	949.987	12,02
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.436.205	22,54	1.526.308	22,77	1.636.136	23,14	1.743.449	23,33	1.864.238	23,58
7	Pengangkutan dan Komunikasi	384.891	6,04	410.324	6,12	433.134	6,13	458.431	6,14	487.562	6,17
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	669.291	10,50	715.317	10,67	779.721	11,03	836.345	11,19	896.697	11,34
9	Jasa-jasa	1.109.558	17,41	1.183.251	17,65	1.264.352	17,89	1.348.486	18,05	1.447.185	18,30
	<b>PDRB</b>	<b>6.373.200</b>	<b>100,00</b>	<b>6.704.100</b>	<b>100,00</b>	<b>7.069.229</b>	<b>100,00</b>	<b>7.471.780</b>	<b>100,00</b>	<b>7.905.974</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

\*)angka sementara

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman atas dasar harga berlaku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tergolong sangat tinggi karena mengalami kenaikan sebesar 53,29 persen yaitu dari Rp. 13.611.725.000.000,- naik menjadi Rp. 20.865.667.000.000,-. Sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi PDRB Sleman atas dasar harga berlaku tahun 2014 adalah Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang menyumbang Rp4.887.560.000.000,-

atau 23,42 persen. Sektor selanjutnya adalah Jasa-jasa yang memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.990.287.000.000,- atau 19,12 persen. Sektor lainnya yang juga memberikan kontribusi cukup berarti adalah Industri Pengolahan yang menyumbangkan sebanyak Rp. 2.845.235.000.000 atau 13,64 persen dari total PDRB. Berikutnya adalah sektor bangunan yang menyumbang sebesar Rp. 2.721.328.000.000,- atau 13,04 persen. Sementara sektor pertanian hanya menempati posisi kelima dari sisi kontribusi terhadap PDRB yaitu Rp2.627.882.000.000,- atau 12,59 persen.

**Tabel 3.18**  
**PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman**

No	Sektor	2010		2011		2012		2013		2014*)	
		(juta Rp)	%								
1	Pertanian	1.771.743	13,02	1.922.985	12,74	2.153.451	12,90	2.461.393	12,88	2.627.882	12,59
2	Pertambangan dan Penggalian	73.245	0,54	86.671	0,57	90.599	0,54	109.786	0,57	110.841	0,53
3	Industri Pengolahan	1.927.170	14,16	2.171.967	14,39	2.274.445	13,62	2.655.364	13,90	2.845.235	13,64
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	174.868	1,28	192.383	1,27	208.066	1,25	233.811	1,22	257.096	1,23
5	Bangunan	1.744.700	12,82	1.921.438	12,73	2.135.294	12,79	2.491.502	13,04	2.721.328	13,04
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	3.097.398	22,76	3.453.129	22,87	3.872.092	23,19	4.444.678	23,26	4.887.560	23,42
7	Pengangkutan dan Komunikasi	780.674	5,74	857.248	5,68	922.507	5,53	1.021.778	5,35	1.107.363	5,31
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.482.757	10,89	1.645.918	10,90	1.861.498	11,15	2.092.643	10,95	2.318.074	11,11
9	Jasa-jasa	2.559.171	18,80	2.845.861	18,85	3.178.630	19,04	3.594.544	18,81	3.990.287	19,12
	<b>PDRB</b>	<b>13.611.725</b>	<b>100,00</b>	<b>15.097.600</b>	<b>100,00</b>	<b>16.696.582</b>	<b>100,00</b>	<b>19.105.499</b>	<b>100,00</b>	<b>20.865.667</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

\*)angka sementara

Produk Domestik Regional Bruto Per kapita Bila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah (wilayah penghitungan PDRB), akan diperoleh angka PDRB per kapita. PDRB per kapita Kabupaten Sleman menurut harga berlaku dan harga konstan menunjukkan kecerungan kenaikan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 tercatat sebesar Rp. 12.450.000,- dan naik menjadi Rp. 17.930.000,- pada tahun 2014 atau naik 44,02 persen. Sementara PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010 tercatat Rp. 5.830.000,- kemudian naik menjadi Rp. 6.790.000,- pada tahun 2014 atau naik 16,47 persen. Angka ini memperlihatkan perkembangan ekonomi di Kabupaten Sleman cukup baik.

**Tabel 3.19**  
**PDRB Per Kapita Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman**

No	PDRB	Nilai (Juta Rp)				
		2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Hb	12,45	13,63	14,98	16,73	17,93
2	Hk	5,83	6,05	6,34	6,54	6,79

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

\*)angka sementara

### 3.2.3.3 Inflasi

Menurut Bank Indonesia, secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi (<http://www.bi.go.id/id>).

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa

kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota. Indikator inflasi lainnya berdasarkan *international best practice* antara lain.

1. **Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)**. Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. [Penjelasan lebih detail mengenai IHPB dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)]
2. **Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)** menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose - COICOP*), yaitu :

1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan
4. Kelompok Sandang
5. Kelompok Kesehatan
6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Inflasi Kabupaten Sleman dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami pasang surut. Tahun 2010 inflasi tercatat sebesar 7,46 kemudian turun menjadi 3,19 pada tahun 2011 atau terjadi penurunan 57,24 persen. Kenaikan inflasi terjadi antara tahun 2011-2013 dari 3,19 menjadi 4,06 (27,27 persen) dan kembali naik menjadi 6,92 (70,44 persen). Terjadi penurunan

kembali pada rentang waktu 2013-2014 yaitu sekitar 15,46 persen yakni dari 6,92 menjadi 5,85. Jika dirata-rata inflasi yang terjadi di Kabupaten Sleman antara tahun 2010-2014 sebesar 5,50.

**Tabel 3.20**  
**Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
Inflasi	7,46	3,19	4,06	6,92	5,85	5,50

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

Inflasi menurut kelompok pengeluaran di Kabupaten Sleman dari tahun 2010 sampai tahun 2014 secara rata-rata paling tinggi adalah bahan makanan yang mencapai 10,36 persen. Berikutnya adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang besarnya mencapai 6,25 persen dan ketiga terbesar adalah kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 5,21 persen. Sementara inflasi terendah menurut kelompok pengeluaran adalah pendidikan, rekreasi, dan olah Raga yaitu hanya sebesar 1,85 persen.

**Tabel 3.21**  
**Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman**

No	Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi (%)					Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Bahan Makanan	22,02	1,97	7,07	12,89	7,85	10,36
2	Makanan jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	6,50	5,19	6,72	8,48	4,35	6,25
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	6,23	3,02	3,90	5,41	6,16	4,94
4	Sandang	5,84	5,63	2,63	0,33	3,11	3,51
5	Kesehatan	0,60	5,58	1,44	2,24	3,50	2,67
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	3,63	0,94	1,32	1,20	2,16	1,85
7	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	2,26	2,12	1,18	12,09	8,41	5,21
	<b>Umum</b>	<b>7,46</b>	<b>3,19</b>	<b>4,06</b>	<b>6,92</b>	<b>5,85</b>	<b>5,50</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

### 3.2.3.4 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk ([www.sipd.bangda.kemendagri.go.id](http://www.sipd.bangda.kemendagri.go.id)).

Indeks Gini di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2012 memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan yaitu dari 0,37 naik menjadi 0,41 dan kembali naik menjadi 0,44. Dapat dikatakan dalam rentang waktu 2010-2012 ketimpangan pendapatan yang terjadi di Sleman semakin tinggi. Namun pada tahun 2013 nilai indeks Gini di Kabupaten Sleman mengalami penurunan menjadi 0,38 dan kembali turun pada tahun 2014 menjadi 0,37. Angka indeks tahun 2014 telah menyamai pencapaian tahun 2010 yaitu 0,37, artinya ketimpangan pendapatan semakin mengecil.

**Tabel 3.22**  
**Indeks Gini Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman**

No	Tahun	Indeks Gini
1	2010	0,37
2	2011	0,41
3	2012	0,44
4	2013	0,38
5	2014*)	0,37

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

\*)angka sementara

### 3.2.4 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sleman dari kurun waktu 2010-2014 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja masih tercatat sebanyak 502.268 jiwa naik menjadi 560.772 jiwa atau naik sebesar 11,5 persen. Sedangkan dari sisi jenis kelamin angkatan kerja tersebut

menunjukkan perbedaan proporsi yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan. Tahun 2010 proporsi angkatan kerja laki-laki mencapai 54,9 persen dan perempuan sebesar 45,1 persen atau selisih hampir 10 persen. Tahun 2014 tidak terjadi perubahan komposisi angkatan angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan karena proporsinya sama persis dengan kondisi di tahun 2010, yaitu lebih tinggi laki-laki (54,9 persen) dibanding perempuan (45,1 persen).

Angkatan kerja dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu bekerja dan tidak bekerja/menganggur. Jumlah angkatan kerja yang berstatus bekerja semakin meningkat dari tahun 2010-2014. Diketahui pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja yang statusnya bekerja mencapai 91,8 persen (461.008 jiwa) dan status tidak bekerja hanya 8,2 persen (41.260 jiwa). Jumlah tersebut meningkat cukup pesat di tahun 2014, dimana jumlah angkatan kerja yang statusnya bekerja naik menjadi 93,8 persen (526.171 jiwa) dan tidak bekerja turun menjadi 6,2 persen (34.601 jiwa).

**Tabel 3.23**  
**Penduduk dan Angkatan Kerja Tahun 2010-2014 Kabupaten Sleman**

No.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
1.	<b>Jumlah Penduduk</b>					
	▪ Laki-laki	547.885	560.146	554.573	521.444	538.704
	▪ Perempuan	545.225	566.742	548.107	525.881	524.744
	▪ Jumlah	1.093.110	1.126.888	1.102.680	1.047.325	1.063.448
2.	<b>Jumlah Angkatan Kerja</b>					
	▪ Laki-laki	275.792	285.813	305.257	296.008	307.826
	▪ Perempuan	226.476	239.513	255.119	245.913	252.946
	▪ Jumlah	502.268	524.326	560.376	541.921	560.772
3.	<b>Angkatan Kerja</b>					
	<b>a. Bekerja</b>					
	▪ Laki-laki	254.413	264.670	286.384	278.474	290.389
	▪ Perempuan	206.595	219.735	236.238	228.388	235.782
	▪ Jumlah	461.008	484.405	522.622	506.862	526.171
	<b>b. Tidak Bekerja/Menganggur</b>					
	▪ Laki-laki	21.379	20.143	18.873	17.534	17.437
	▪ Perempuan	19.881	19.778	18.881	17.525	17.164
	▪ Jumlah	41.260	39.921	37.754	35.059	34.601

Sumber: Dinas Nakeros Kabupaten Sleman, 2014

Menurut lapangan usaha yang ditekuni oleh penduduk Sleman berusia 15 tahun ke atas paling banyak adalah perdagangan dan hotel. Pada tahun 2011

sebanyak 156.470 jiwa yang bekerja di sektor perdagangan dan hotel meningkat menjadi 163.393 jiwa pada tahun 2014 atau naik sebesar 4,42 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga cukup besar adalah sektor jasa dan tercatat tahun 2010 sebanyak 138.768 jiwa meningkat menjadi 150.175 jiwa atau naik sebesar 8,22 persen. Secara persentase kenaikan yang terjadi di sektor jasa lebih tinggi dibandingkan dengan sektor perdagangan dan hotel. Sementara lapangan usaha yang paling rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu hanya 2.537 jiwa di tahun 2014. Pada tahun 2011, sebenarnya sektor pertambangan Namun sektor listrik, gas, dan air bersih naik cukup tinggi dari tahun 2012-2014.

**Tabel 3.24**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014 Kabupaten Sleman**

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*)
1	Pertanian	92.941	111.054	103.806	83.437
2	Pertambangan dan Penggalian	5.091	5.830	1.778	2.537
3	Industri Pengolahan	71.708	68.569	66.022	87.804
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	2.557	1.876	3.891	5.016
5	Bangunan	37.425	35.635	26.127	32.867
6	Perdagangan dan Hotel	156.470	137.877	158.974	163.393
7	Angkutan dan Komunikasi	36.736	23.046	23.988	30.802
8	Keuangan dan Jasa Perusahaan	20.198	26.753	28.554	34.048
9	Jasa-jasa	138.768	133.798	142.447	150.175
	<b>Jumlah</b>	<b>561.894</b>	<b>544.438</b>	<b>554.867</b>	<b>590.080</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

\*)angka sementara

Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 3.24. Data yang menarik adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dari tahun 2011-2014 menunjukkan pola yang tidak tetap, dimana antara tahun 2011-2013 memperlihatkan pola yang menurun. Tercatat penurunan TPak sebesar 5,13 persen dari tahun 2011-2013, kemudian terjadi peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2014 yang mencapai 4,34 persen. Pola yang hampir sama terjadi pada tingkat pengangguran terbuka yang cenderung naik turun. Dari tahun 2011-2012 tingkat pengangguran terbuka memperlihatkan kenaikan dari 5,25 menjadi 5,42 (3,42 persen), tetapi dari tahun 2012-2013 terjadi penurunan yang cukup tinggi yakni mencapai 37,64 persen. Akan tetapi angka tersebut kembali naik dalam rentang waktu 2013-2014 yaitu sebesar 24,56 persen. Naik turunnya TPak dan pengangguran terbuka memberikan

gambaran belum tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu menampung angkatan kerja yang ada.

**Tabel 3.25**  
**Perkembangan Ketenagakerjaan tahun 2011-2014 Kabupaten Sleman**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014*)
1	Penduduk Usia Kerja	862.547	867.370	880.502	905.284
2	Angkatan Kerja	593.046	575.650	574.273	616.023
	- Bekerja	561.894	544.438	554.867	590.080
	- Penganggur Terbuka	31.152	31.212	19.406	25.943
3	Bukan Angkatan Kerja	269.501	292.080	306.229	289.261
4	TPAK (%)	68,75	66,34	65,22	68,05
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,25	5,42	3,38	4,21

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

\*)angka sementara

### 3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Variabel penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan terdiri atas dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar 80,73. Dari tahun ke tahun, nilai IPM terlihat bahwa nilai IPM Kabupaten Sleman terus meningkat, yang bisa diartikan telah terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman menempati peringkat kedua tertinggi di DIY setelah Kota Yogyakarta. Nilai IPM Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori sangat tinggi (IPM > 80).

**Tabel 3.26**  
**Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Sleman Tahun 2010-2014 \*)**

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Indikator Penyusunan IPM</b>					
1. Angka Harapan Hidup (tahun)	74,43	74,44	74,46	74,47	74,47
2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,42	15,45	15,48	15,52	15,64
3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,79	10,03	10,03	10,03	10,28
4. Pengeluaran Perkapita Riil Sehari Disesuaikan	13.848	13.882	13.916	14.085	14.170
<b>Indeks IPM</b>					
1. Indeks Kesehatan	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
2. Indeks Pengetahuan	0,75	0,76	0,76	0,77	0,78
Indeks Harapan Lama Sekolah	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87
Indeks Rata-rata Lama Sekolah	0,65	0,67	0,67	0,67	0,69
3. Indeks Pendapatan	0,80	0,80	0,80	0,81	0,81
<b>IPM</b>	<b>79,69</b>	<b>80,04</b>	<b>80,10</b>	<b>80,26</b>	<b>80,73</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

\*) dihitung dengan metode baru

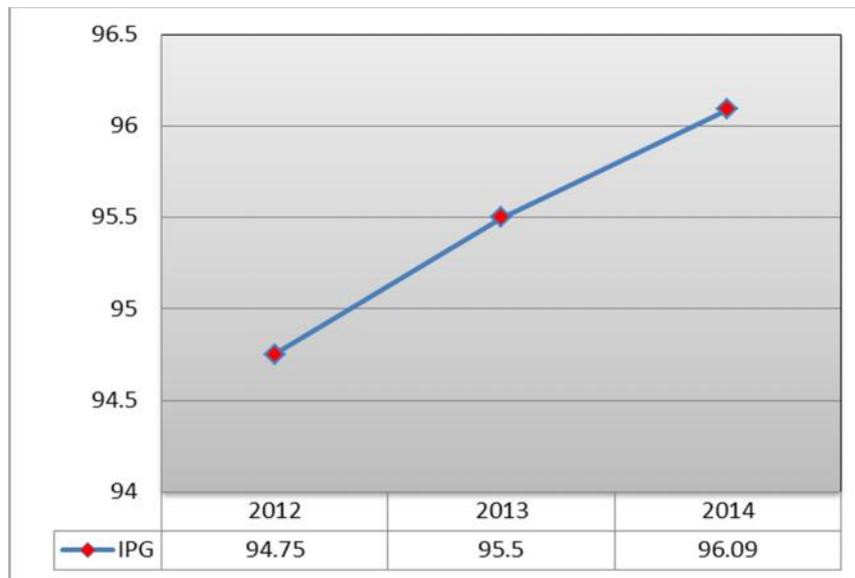
### 3.2.6 Indeks Pembangunan Gender

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai penggabungan beberapa indikator yang telah dibahas sebelumnya menjadi satu indeks komposit yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur angka rata-rata pencapaian dalam kemampuan dasar sama seperti dalam IPM yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (kontribusi pendapatan) tetapi dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender.

Titik berat pembangunan gender adalah berupaya memberdayakan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

Nilai IPG berkisar antara 0 hingga 100. Apabila nilai IPG sama dengan IPM artinya tidak ada ketimpangan gender. Nilai IPG yang lebih rendah dari IPM menunjukkan adanya ketimpangan gender. Sebagai indikator komposit, IPG hanya memberikan gambaran secara agregat, sedangkan implementasi hasil penghitungan IPG dalam program pembangunan membutuhkan kajian lebih jauh pada indikator tau variabel yang terkait dengan komponen penyusun IPG.

Gambar 3.2 menunjukkan perkembangan IPG Kabupaten Sleman tahun 2012-2014. Pada tahun 2013 menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2012 yaitu dari 94,75 menjadi 95,50. Hasil penghitungan IPG pada tahun 2014 sudah mencapai angka 96,09, hal ini menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2013. Pada tahun 2014, untuk wilayah DI Yogyakarta, nilai IPG Kabupaten Sleman berada diperingkat 2 setelah Kota Yogyakarta, diikuti Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul.



Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2014

**Gambar 3.2 Perkembangan IPG Kabupaten Sleman Tahun 2012-2014**

Selain memperhatikan perubahan angka indeksnya, mengingat IPG merupakan indeks komposit maka perlu dikaji juga beberapa perubahan pada komponen pembentuknya. Komponen kesehatan dan pendidikan mengalami perkembangan cukup tinggi, sedangkan ekonomi (variabel pendapatan) relative tidak mengalami perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di dunia kerja masih perlu terus ditingkatkan.

**Tabel 3.27**  
**Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sleman**  
**Tahun 2013-2014**

Uraian	2013	2014
<b>Komponen IPG</b>		
1. Angka Harapan Hidup (tahun)	76,39	77,41
2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,23	15,44
3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,49	9,76
4. Kontribusi Perempuan terhadap Pendapatan (000 Rp)	13.405	13.979
<b>Indeks IPG</b>		
1. Kesehatan	81,48	83,13
2. Pendidikan	73,94	75,42
3. Pendapatan	79,09	80,37
<b>IPM Perempuan</b>	<b>78,55</b>	<b>79,50</b>
<b>IPG</b>	<b>95,50</b>	<b>96,09</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

Pada Tabel 3.28 dibawah ini terlihat bahwa nilai IPG semua kabupaten/kota di D.I Yogyakarta dari tahun 2013 ke 2014 mengalami kenaikan, termasuk Kabupetn Sleman. Pada tahun 2014 nilai IPG Sleman masih menduduki peringkat kedua di wilayah D.I. Yogyakarta.

**Tabel 3.28**

**Indeks Pembangunan Gender (IPG) D.I. Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2014**

Kode	Prov/Kab	Angka Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Seklah (tahun)		Sumbangan Pendapatan (persen)		IPG		Peringkat IPG	
		Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	2013	2014	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>3400</b>	<b>DIY</b>	<b>76,36</b>	<b>72,72</b>	<b>14,50</b>	<b>15,21</b>	<b>8,29</b>	<b>9,42</b>	<b>12.207</b>	<b>60,13</b>	<b>94,15</b>	<b>94,31</b>	<b>2*</b>	<b>2*</b>
3401	Kulonprogo	76,85	72,82	14,48	13,09	7,64	8,81	8.207	11.424	94,23	94,65	4	3
3402	Bantul	75,13	71,22	13,98	14,89	8,31	9,21	13.548	16.463	94,33	94,41	3	4
3403	Gunung Kidul	75,30	71,37	12,14	13,00	5,72	7,26	5.551	13.970	81,76	82,27	5	5
3404	Sleman	76,39	72,43	15,44	15,96	9,76	10,83	13.979	15.402	95,50	96,09	2	2
3471	Kota Yogyakarta	75,98	72,03	15,85	16,22	10,86	11,73	18.062	15.893	98,48	99,27	1	1

Sumber: BPS Kabupaten Sleman (Angka Sementara)

Keterangan: \*)peringkat secara nasional

Dari Tabel 3.27 terlihat bahwa nilai IPG semua kabupaten/kota di D.I Yogyakarta dari tahun 2013 hingga 2014 mengalami peningkatan termasuk Kabupaten Sleman. Pada tahun 2014 nilai IPG Kabupaten Sleman masih menduduki peringkat kedua di D.I Yogyakarta.

Tabel 3.29

## Capaian IPM dan IPG di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2014

Tahun	Nilai IPM	Nilai IPG
(1)	(2)	(3)
2010	79,69	92,96
2011	80,04	94,22
2012	80,10	94,75
2013	80,26	95,50
2014	80,73	96,09

Sumber: BPS Kabupaten Sleman (diolah)

\* Angka sementara

### 3.2.7 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pandangan masyarakat telah banyak mengalami pergeseran ke arah kemajuan seiring dengan perkembangan iklim sosial budaya yang semakin kondusif. Saat ini semakin banyak perempuan yang ikut dalam menentukan arah dan gerak pembangunan bangsa. Perempuan telah banyak berpartisipasi dalam sektor publik, baik bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, atau di ranah politik.

#### 3.2.7.1 Partisipasi dalam Bidang Legislatif

Seberapa besar azas demokrasi telah diterapkan di suatu daerah dapat tercermin dari komposisi anggota DPR menurut jenis kelamin di daerah tersebut. Dalam kondisi ideal, komposisi penduduk yang hampir berimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan maka komposisi anggota DPRD-nya semestinya juga berimbang.

Tabel 3.30

#### Banyaknya Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman Tahun 2009-2014 dan 2014-2019

Jenis Kelamin	2009-2014		2014-2019	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perempuan	9	18,0	8	16,0
Laki-laki	41	82,0	42	84,0
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100,0</b>	<b>50</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Setwan Kabupaten Sleman

Namun kenyataannya yang terjadi di beberapa daerah masih jauh dari harapan tersebut. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Sleman saat ini masih didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 84 persen dari seluruh anggota, sementara jumlah perempuan hanya 16 persen. Tabel 3.20 diatas menunjukkan bahwa persentase perempuan sebagai anggota legislatif masih tergolong rendah. Rendahnya anggota legislatif perempuan dikarenakan masih kurangnya kemampuan dalam menyampaikan pendapat, kurangnya kepercayaan diri, minat dan kesempatan perempuan di bidang politik.

### 3.2.7.2 Partisipasi dalam Bidang Eksekutif

Selain sebagai politisi di lembaga legislatif, dalam kehidupan publikpun perempuan dapat berperan, seperti di lembaga eksekutif sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**Tabel 3.31**

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Sleman menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 dan 2013**

Jenis Kelamin	2013		2014	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perempuan	6.775	56,32	6.911	56,97
Laki-laki	5.257	43,69	5.219	43,03
<b>Jumlah</b>	<b>12.032</b>	<b>100,00</b>	<b>12.130</b>	<b>100,0</b>

*Sumber: BKD Kabupaten Sleman*

Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pada tahun 2013 proporsi perempuan yang menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman lebih besar dibanding laki-laki yaitu 56,32 persen berbanding 43,68 persen. Pada tahun 2014, proporsi perempuan PNS Pemerintah Kabupaten Sleman meningkat menjadi 56,97 persen, sehingga proporsi laki-laki menurun menjadi 43,03 persen. Dari tabel 3.30 diatas juga menunjukkan bahwa seks rasio PNS di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 adalah 75,52. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa terdapat sekitar 76 orang PNS laki-laki untuk setiap 100 orang PNS perempuan.

Pada paragraf sebelumnya telah disebutkan bahwa jumlah PNS perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Akan tetapi apabila diperhatikan lebih jauh, ternyata jumlah perempuan yang memegang jabatan (terutama eselon tiga ke atas) atau menjadi pimpinan masih sangat timpang jumlahnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut.

**Tabel 3.32**

**Jumlah Pejabat menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman Tahun 2014**

Jenis jabatan	Perempuan		Laki-laki		Perempuan+Laki-laki	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Eselon II	10	32,26	21	67,74	31	100,00
Eselon III Camat	2	11,76	15	88,24	17	100,00
Eselon III Non Camat	46	35,38	84	64,62	130	100,00
Eselon IV	236	40,83	342	59,17	578	100,00
Eselon V	30	46,88	34	53,13	64	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>324</b>	<b>39,51</b>	<b>496</b>	<b>60,49</b>	<b>820</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BKD Kabupaten Sleman

Pada tahun 2014, jumlah jabatan Eselon V sebanyak 64 jabatan dan 46,88 persen dipegang oleh perempuan. Jumlah jabatan Eselon IV sebanyak 570, sedangkan perempuan yang menduduki jabatan Eselon IV sebanyak 236 orang atau sekitar 40,83 persen. Jumlah perempuan yang menduduki Eselon III Non Camat sebanyak 46 dari 130 jabatan yang tersedia, atau sekitar 35,38 persen. Dominasi laki-laki terhadap perempuan sangat terlihat dari jumlah camat. Dari 17 kecamatan, 15 jabatan dipegang oleh camat laki-laki dan hanya 2 camat perempuan. Sementara itu, perempuan yang menduduki jabatan Eselon II adalah 10 orang (32,26 persen) dari 31 jabatan.

### 3.3 Pembangunan Keluarga

Keluarga mempunyai peran baik fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagimenjadi delapan. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluargamenurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yaitu :

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan darisebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan

Tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang sejahtera, dan kurang berketahanan sosial. Dampak dari tidak berfungsinya keluarga secara optimal adalah munculnya beberapa permasalahan dari sisi internal maupun eksternal keluarga.

Dari sisi internal keluarga, beberapa dampak yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

- penyikapan terhadap pola berkeluarga  
Sebagian keluarga belum memahami pola keluarga yang ideal sehingga ketidak pahaman ini menghambat implementasi pola keluarga ideal.
- pemenuhan hak dasar keluarga  
Pemenuhan hak dasar keluarga, seperti partisipasi dalam pendidikan serta akses terhadap pelayanan kesehatan, perumahan, dan sosial, belum sepenuhnya tercapai.
- berkaitan dengan ketahanan keluarga
  - \* rendahnya tingkat partisipasi keluarga terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
  - \* adanya konflik antar kelompok, utamanya di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta. Potensi konflik juga terjadi antara penduduk asli dengan penduduk pendatang utamanya di kawasan perumahan.
  - \* rendahnya partisipasi keluarga untuk terlibat dalam kegiatan organisasi di masyarakat
  - \* rendahnya kemampuan keluarga dalam memelihara kearifan lokal dan dalam mengelola sumber daya

Dampak eksternal keluarga yang dapat dicatat adalah sebagai berikut.

- Daya dukung lingkungan

Pertambahan penduduk yang tidak terkendali di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, seperti beralih fungsinya lahan produktif (sawah dan perkebunan) untuk permukiman dan makin berkurangnya ketersediaan air bersih. Penduduk yang bertambah mengakibatkan mobilitas yang tinggi dan meningkatkan jumlah alat transportasi. Hal ini menyebabkan pencemaran udara yang akan berpengaruh pada gangguan kesehatan. Pertambahan penduduk meningkatkan jumlah limbah rumah tangga/industri dan sampah sehingga meningkatkan pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan gangguan kesehatan.

- Penyikapan terhadap program yang prokeluarga. Kebijakan dan program pendukung kesejahteraan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat belum terintegrasi dan terkoordinasi.

Mengacu kepada UU No Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik yang masuk disebabkan oleh keluarga miskin, keluarga kurang sejahtera dan kurang berketahanan sosial. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.32.

**Tabel 3.33**  
**Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Lapangan Pekerjaan Utama Kepala**  
**Keluarga di Kabupaten Sleman Tahun 2014**

Kecamatan	Lapangan Pekerjaan Utama							Jumlah
	Tidak bekerja	Pertanian & palawija	Pertanian lainnya	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
Moyudan	124	919	15	87	44	341	240	1.770
Minggir	185	1.356	10	33	75	477	390	2.526
Seyegan	300	1.127	29	92	134	1.219	710	3.611
Godean	301	626	31	109	163	1.272	659	3.161
Gamping	343	426	49	112	177	1.196	802	3.105
Mlati	318	590	20	80	163	1.338	699	3.208
Depok	178	138	8	29	120	626	419	1.518
Berbah	205	584	24	70	97	713	343	2.036
Prambanan	259	1.412	32	41	135	1.138	404	3.421
Kalasan	240	916	20	46	108	897	483	2.710
Ngemplak	170	718	8	11	47	479	218	1.651
Ngaglik	170	744	18	37	108	654	354	2.085
Sleman	429	1.225	9	126	146	1.185	745	3.865
Tempel	171	1.820	15	74	167	1.053	696	3.996
Turi	113	1.328	12	21	56	334	192	2.056
Pakem	73	602	31	14	30	197	166	1.113
Cangkringan	114	1.125	95	17	43	391	181	1.966
<b>Jumlah</b>	<b>3.693</b>	<b>15.656</b>	<b>426</b>	<b>999</b>	<b>1.813</b>	<b>13.510</b>	<b>7.701</b>	<b>43.798</b>

Sumber: Badan KB, PM, dan PP

Tabel 3.32 menunjukkan bahwa terdapat 3.693 KK miskin yang tidak bekerja. KK miskin yang tidak bekerja paling banyak terdapat di Kecamatan Sleman (429 KK) dan paling rendah di Kecamatan Pakem (73 KK). Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan suatu kebijakan terkait dengan penciptaan lapangan kerja terutama pada masyarakat miskin. Sebagian keluarga miskin tersebut bekerja di sektor pertanian dan palawija (15.656 KK) kemudian di sektor jasa (13.510 KK). Rumah Tangga miskin yang bekerja di sektor jasa paling banyak ada di Kecamatan Mlati yaitu 1.338 KK, kemudian kecamatan Godean (1.272 KK), dan yang paling rendah adalah Kecamatan Pakem yaitu 197 KK.

**Tabel 3.34**  
**Persentase Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Lapangan Pekerjaan Utama**  
**Kepala Keluarga di Kabupaten Sleman Tahun 2014**

Kecamatan	Lapangan Pekerjaan Utama (%)							Jumlah
	Tidak bekerja	Pertanian & palawija	Pertanian lainnya	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
Moyudan	7,0	51,9	0,8	4,9	2,5	19,3	13,6	100,0
Minggir	7,3	53,7	0,4	1,3	3,0	18,9	15,4	100,0
Seyegan	8,3	31,2	0,8	2,5	3,7	33,8	19,7	100,0
Godean	9,5	19,8	1,0	3,4	5,2	40,2	20,8	100,0
Gamping	11,0	13,7	1,6	3,6	5,7	38,5	25,8	100,0
Mlati	9,9	18,4	0,6	2,5	5,1	41,7	21,8	100,0
Depok	11,7	9,1	0,5	1,9	7,9	41,2	27,6	100,0
Berbah	10,1	28,7	1,2	3,4	4,8	35,0	16,8	100,0
Prambanan	7,6	41,3	0,9	1,2	3,9	33,3	11,8	100,0
Kalasan	8,9	33,8	0,7	1,7	4,0	33,1	17,8	100,0
Ngemplak	10,3	43,5	0,5	0,7	2,8	29,0	13,2	100,0
Ngaglik	8,2	35,7	0,9	1,8	5,2	31,4	17,0	100,0
Sleman	11,1	31,7	0,2	3,3	3,8	30,7	19,3	100,0
Tempel	4,3	45,5	0,4	1,9	4,2	26,4	17,4	100,0
Turi	5,5	64,6	0,6	1,0	2,7	16,2	9,3	100,0
Pakem	6,6	54,1	2,8	1,3	2,7	17,7	14,9	100,0
Cangkringan	5,8	57,2	4,8	0,9	2,2	19,9	9,2	100,0
<b>Jumlah</b>	<b>8,4</b>	<b>35,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,3</b>	<b>4,1</b>	<b>30,8</b>	<b>17,6</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Badan KB, PM, dan PP

Persentase penduduk miskin berdasarkan lapangan kerja utama menunjukkan bahwa 35,7 persen dari lapangan kerja yang terserap oleh rumah tangga miskin ada pada sektor pertanian dan palawija. Sementara sektor jasa terdapat sebanyak 30,8 persen rumah tangga miskin. Berdasarkan sebaran wilayah per kecamatan, sektor pertanian paling banyak berada di Kecamatan Turi (64,6persen) dan yang paling rendah adalah Kecamatan Depok yaitu 9,1 persen (lihat Tabel 3.34). Selain sektor pertanian dan jasa, sebagian rumah tangga miskin bekerja pada sektor perdagangan (4,1 persen), industri (2,3 persen), dan pertanian lainnya (1,0 persen).

### 3.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Sebagai kota budaya dan kota pendidikan, Sleman dihadapkan pada masalah mobilitas penduduk. Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan persebaran penduduk. Kesenjangan tersebut akan memengaruhi pola, arah, dan tren mobilitas penduduk. Kecenderungannya adalah arus mobilitas penduduk berasal dari daerah yang belum maju menuju ke daerah yang lebih maju. Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor tersebut turut menjadi penentu arah, arus, dan volume mobilitas penduduk.

Migrasi masuk ke Sleman pada 2013 diketahui sebanyak 10.609 jiwa dengan perincian 4.996 laki-laki dan 5.613 perempuan. Sementara migrasi keluar dari Sleman pada 2013 dan berpindah ke daerah lain di DIY maupun luar provinsi mencapai 7.875 jiwa dengan terdiri dari 3.591 laki-laki dan 4.284 perempuan. Dengan demikian diketahui migrasi bersih di Kabupaten Sleman mencapai 2.734 jiwa (Tabel 3.34).

Data pada 2014 menunjukkan terjadi perubahan jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar Sleman. Migrasi masuk mencapai 11.950 (laki-laki sebanyak 5.560 jiwa dan 6.390 perempuan) atau naik sebesar 12,64 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan migrasi keluar Sleman juga menunjukkan kenaikan yang cukup besar yaitu 9.448 jiwa atau mencapai 19,97 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Total migrasi bersih tahun 2014 sebesar 2.502 jiwa atau turun sebesar 8,49 persen dibandingkan dengan tahun 2013.

Tabel 3.35

#### Migrasi Bersih Kabupaten Sleman, 2013 dan 2014

Migrasi	2013			2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Migrasi Masuk	4.996	5.613	10.609	5.560	6.390	11.950
Migrasi Keluar	3.591	4.284	7.875	4.212	5.236	9.448
Migrasi bersih	<b>1.405</b>	<b>1.329</b>	<b>2.734</b>	<b>1.348</b>	<b>1.154</b>	<b>2.502</b>

Sumber: Disdukcapil Sleman, 2015

### 3.5 Data dan Informasi Kependudukan

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan DIY dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, pada gilirannya nanti akan dapat didayagunakan untuk kepentingan-kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan yang berkelanjutan.

Sumber data kependudukan dapat diambil dari beberapa sumber sebagai berikut.

1. Sensus penduduk dengan informasi yang dikumpulkan bersifat umum, dilakukan di seluruh Indonesia, untuk semua penduduk, tidak menggunakan sampel penduduk atau sampel wilayah, dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali.
2. Survei kependudukan untuk pengumpulan data umum dan khusus. Untuk data kependudukan yang umum adalah SUPAS (Survey Penduduk Antar Sensus) yang dilaksanakan 10 tahun sekali dan yang khusus misalnya Sakernas untuk bidang ketenagakerjaan yang dikumpulkan dua kali dalam setahun. Disamping itu, Indonesia juga melaksanakan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang terdiri dari Susenas inti untuk pengumpulan data pokok bidang sosialekonomi yang dilakukan sekali setahun dan Susenas Modul untuk data yang lebih rinci atau khusus, seperti pendapatan, pengeluaran, kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan tempat tinggal, dan sosial budaya lainnya yang dilakukan setiap tiga tahun. Di luar kedua survei ini, masih ada yang lain, seperti SDKI serta Survei Upah dan Perjalanan dan lain sebagainya.
3. Registrasi atau pendaftaran penduduk yang dilakukan setiap saat apabila ada perubahan status kependudukan. Dalam sistem ini,

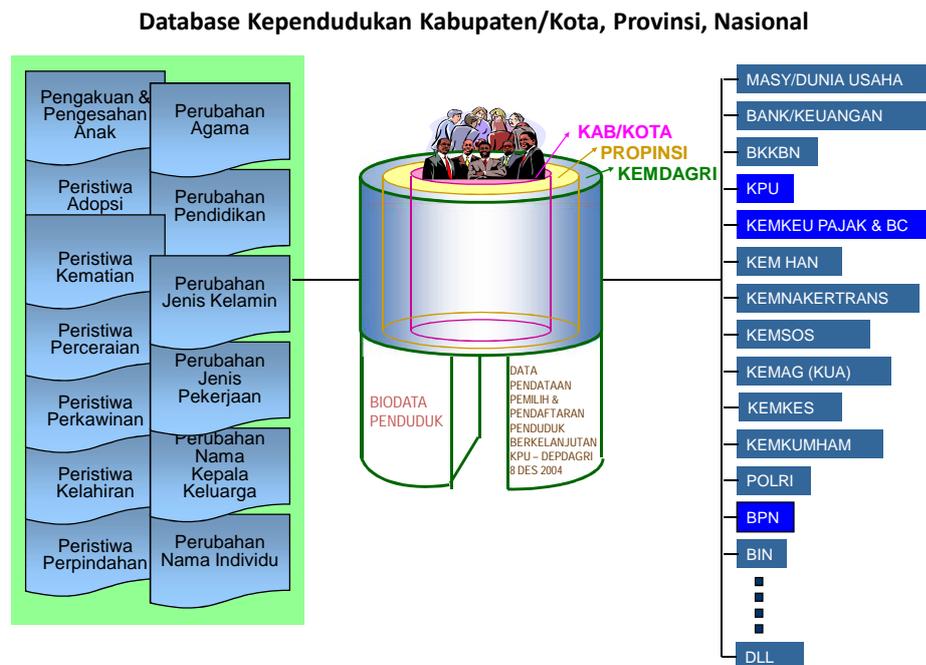
penduduk dan/atau rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan mulai dari RT, RW, dan dusun. Apabila penduduk atau rumah tangga pasif melaporkan kepada petugas pencatatan dan pelaporan, akan terjadi kekurangan cacah perubahan status kependudukan yang terjadi. Sifat pasif dalam melaporkan perubahan status kependudukan merupakan kelemahan utama dari pelaksanaan registrasi/pendaftaran penduduk. Secara normatif, registrasi penduduk merupakan sumber data yang paling ideal. Hal ini didasarkan pada karakteristik data registrasi penduduk.

- a. Pertama, dari sisi cakupan, registrasi penduduk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mencakup unit administrasi terkecil, yaitu desa/kalurahan. Hal ini memungkinkan penggunaan hasil registrasi penduduk untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
- b. Kedua, registasi penduduk dilaksanakan secara kontinyu, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan setiap waktu.

Sebagai sumber data yang ideal, registrasi penduduk sampai dengan saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu masalahnya adalah kualitas data yang rendah. Sumber masalah tersebut diantaranya adalah penggunaan sistem pasif yang dalam tingkat tertentu bersamaan dengan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan kehadiran demografis, menyebabkan data yang terkumpul *underreporting*. Persoalan yang perlu dicari pemecahannya adalah membuat penduduk lebih proaktif untuk melaporkan perubahan status kependudukan kepada petugas yang berwenang pada tingkat dusun dan desa, bahkan RT sebagai ujung tombak pendaftaran penduduk. Memperkuat pemahaman dalam pencatatan dan pelaporan pada lini paling bawah ini sangat penting karena kelengkapan dan kualitas data berada pada tingkat desa. Pada tingkat desa inilah sebagian besar daftar isian atau formulir pencatatan tersedia secara lengkap.

Data dasar (*database*) kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jejaring komunikasi data. Untuk itu, diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban

dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.



**Gambar 3.3 Data Dasar (Database) Kependudukan di Indonesia**

Untuk membangun data dasar (*database*) kependudukan, saat ini sedang dibangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam kerangka administrasi kependudukan, yang terdiri dari hal-hal berikut.

1. Sistem Pendaftaran Penduduk (Dafduk)
  - pencatatan biodata penduduk per keluarga
  - pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan
  - pendataan penduduk rentan kependudukan
  - pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri
2. Sistem Pencatatan Sipil (Capil)
  - pencatatan kelahiran
  - pencatatan lahir mati
  - pencatatan perkawinan
  - pencatatan pembatalan perkawinan
  - pencatatan perceraian

- pencatatan pembatalan perceraian
- pencatatan kematian
- pencatatan pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak
- pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
- pencatatan peristiwa penting
- pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

Hasil yang telah dicapai tahun 2010 adalah pemutakhiran data dasar (*database*) kependudukan di semua kabupaten dan kota serta penerbitan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) di 329 kabupaten dan kota. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas penduduk lainnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa masalah data dan informasi kependudukan yang muncul di Indonesia adalah belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Penataan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan telah dimulai sejak tahun 1960-an, tetapi hingga saat ini belum terwujud. Walaupun telah ada peraturan tentang pengelolaan sistem informasi kependudukan, sampai saat ini belum dapat terwujud sistem informasi kependudukan yang memadai. Masih banyaknya permasalahan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk ganda dan kesulitan pengurusan akta kelahiran. Selanjutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasinya belum memadai. Bank data sebagai data dasar kependudukan juga belum tersedia.

Sementara itu, secara khusus beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan kondisi Administrasi Kependudukan di Indonesia adalah sebagai berikut.

### 1). Regulasi

- Regulasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih belum lengkap dan memadai. Hal ini menyebabkan lembaga legislatif sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan TIK yang sangat pesat.
- Harmonisasi regulasi antar instansi terkait dengan pemanfaatan *database* kependudukan dari pelayanan aplikasi SIAK masih perlu diintensifkan menuju konvergensi seluruh regulasi yang saling mendukung dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

### 2). Kelembagaan

- Sinkronisasi struktur organisasi dengan tupoksi  
Sinkronisasi struktur organisasi dengan tupoksi masih belum optimal. Oleh karena itu, pekerjaan setiap direktorat atau Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tupoksinya menjadi terhambat.
- Koordinasi kegiatan antarunit yang bermuara pada pencapaian visi  
Kegiatan antar unit yang bermuara pada pencapaian visi belum terkoordinasi secara baik sehingga pencapaian visi itupun menjadi terhambat.

### 3). Sumber Daya Manusia

Kemampuan SDM dalam mendukung penerapan aplikasi SIAK sebagai sub sistem pengelola *database* kependudukan masih perlu ditingkatkan. Pemahaman SDM terhadap sistem ini masih sangat rendah dan jumlahnya masih sedikit. Hal ini akan berakibat terhambatnya penerapan dan pemanfaatan aplikasi SIAK.

### 4). Aplikasi dan *Database* SIAK

- Penerapan aplikasi SIAK masih belum optimal karena terbatasnya kesiapan infrastruktur.
- Konsolidasi *database* dari kabupaten/kota kemudian ke pusat data pusat dan provinsi masih rendah. Meskipun daerah telah mengimplementasikan SIAK, konsolidasi data ke jenjang berikutnya (provinsi dan ke pusat) masih belum optimal.

- Penerapan tata kelola IT (*governance*) yang mendukung tercapainya tata administrasi kependudukan belum optimal.
- Pemanfaatan *database* kependudukan masih mengalami kendala dan belum sesuai harapan.

#### 5). Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

- Nomor Induk Kependudukan

Kondisi NIK yang ada masih belum pasti tunggal yang diindikasikan dengan masih terdapatnya penduduk yang memiliki beberapa NIK. Walaupun NIK yang diterbitkan adalah unik, beberapa NIK yang unik tersebut dimiliki oleh penduduk yang sama. Hal ini karena setiap *database* kependudukan belum tersambung melalui jaringan komunikasi data dan terkonsolidasi secara nasional serta belum termanfaatkannya faktor ketiga dalam proses pemastian ketunggalan, yaitu karakteristik yang melekat pada diri seseorang, yaitu biometri sidik jari. Apabila NIK tunggal telah direalisasikan, maka pemanfaatan NIK tunggal sebagai kunci akses pelayanan dapat memudahkan penduduk dalam registrasi dan transaksi, baik untuk layanan pemerintahan maupun nonpemerintahan.

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Masih banyak beredar KTP palsu dan KTP ganda yang dimanfaatkan untuk hal-hal ilegal, terorisme, kriminal, dan pemalsuan identitas. KTP yang bersifat nasional masih kurang dipercaya sehingga banyak kebijakan lokal maupun institusi yang “mengharuskan” penduduk agar memiliki KTP di tempat penduduk tersebut bertransaksi. Hal ini tersebut tampak dalam praktik berikut ini.

- Di lapangan beberapa instansi “mengharuskan” penduduk memiliki KTP di tempat kejadian transaksi walaupun orang tersebut telah memiliki KTP dari tempat asal. Hal ini mendorong maraknya penerbitan KTP “lokal”, yang secara nasional akan berakibat pada penerbitan KTP ganda. Kebijakan yang melarang kepemilikan KTP ganda, baik untuk urusan administrasi pemerintahan maupun urusan nonpemerintah, telah dikeluarkan. Namun permasalahan koordinasi, sosialisasi, dan penegakan (*enforcement*) kebijakan

dengan lembaga/instansi terkait masih lemah sehingga praktik KTP ganda tetap berlangsung.

- Potensi manipulasi data biodata penduduk tidak semua dapat terdeteksi dalam proses verifikasi dan validasi untuk penerbitan dokumen kependudukan. Pada banyak kasus, data invalid masih dapat dideteksi pada proses verifikasi dan validasi, tetapi sengaja dibiarkan agar dapat menerbitkan dokumen kependudukan. Sistem verifikasi dan validasi, serta kontrol prosedur/SOP masih dapat dimanipulasi oleh faktor manusia. Diperlukan suatu sistem dan mekanisme verifikasi dan validasi dari otentitas jati diri penduduk yang lebih kebal manipulasi (*robust*). Sistem e-KTP didesain lebih kebal manipulasi yang disebabkan oleh faktor manusia.
- KTP belum dapat dijadikan sebagai kartu identitas pemilih dalam pemilu nasional. Kegiatan pendaftaran penduduk untuk pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus melalui tahapan proses dan verifikasi sehingga hasil akhir DPT masih menimbulkan masalah. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, permasalahan DPT menyebabkan Mahkamah Konstitusi melegalkan penggunaan KTP, dengan syarat tambahan tertentu, pada saat-saat terakhir menjelang dilaksanakannya pemilu. Namun hal tersebut bukanlah suatu solusi permanen. Sistem e-KTP akan lebih mempermudah kebijakan penggunaan KTP sebagai kartu identitas pemilih.

## 6. Infrastruktur TIK

Kondisi infrastruktur yang tersedia di lingkungan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri maupun di daerah masih terbatas. Untuk itu, perlu ditingkatkan pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung operasional aplikasi SIAK.

# BAB IV

## KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN

### 4.1 Kuantitas Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Sleman tahun 2015-2035 diketahui pada 2015 jumlah penduduk Sleman sebesar 1.063.448 jiwa dengan perincian 538.704 laki-laki dan 524.744 perempuan. Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 1.177.141 jiwa tahun 2035 sebagai akhir tahun proyeksi. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Sleman setiap tahunnya mencapai 0,53 persen.

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk Sleman lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan meskipun secara persentase semakin mengecil perbedaannya. Jika pada tahun awal proyeksi persentase penduduk laki-laki mencapai 50,7 persen dan perempuan 49,3 persen, perbedaannya semakin menipis tahun 2035, yakni laki-laki sebesar 50,20 persen dan perempuan 49,80 persen.

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan (Tukiran, 2010).

Pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) merupakan harapan kondisi kependudukan setiap daerah baik pada level negara ataupun level yang lebih kecil. Kondisi tersebut ditandai dengan jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner dan kondisinya terus stabil seperti itu (Iskandar, 2977; Swanson and Siegel, 2004; Tukiran, 2010).Capaian penduduk tumbuh seimbang juga ditandai dengan rendahnya nilai TFR yang berada pada angka 2,1 dan NRR sebesar 1

(Tukiran, 2010). Dengan menggunakan indikator tersebut sebenarnya TFR dan NRR Kabupaten Sleman telah memenuhi target. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan diharapkan angka kelahiran total (TFR) di Sleman akan menjadi 1,8 per wanita atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 0,87 per wanita pada tahun 2015. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 1,77 per wanita dan NRR menjadi 0,85 pada tahun 2020. Kondisi ini akan terus turun sampai dengan tahun 2035 dan nilai TFR menjadi 1,7 dan nilai NRR sebesar 0,82 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, 2015).

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari DIY yang memiliki TFR yang sudah rendah. Meskipun demikian pada 2035 Kabupaten Sleman tetap menargetkan TFR yang lebih rendah lagi yaitu sebesar 1,7. Salah satu aspek yang mendukung penurunan tersebut adalah adanya program keluarga berencana yang gencar diterapkan di Sleman. Seperti diketahui bahwa di negara-negara maju TFR yang rendah akan menciptakan kemajuan. Di negara maju TFR mencapai 1,5 per wanita atau bahkan nilai TFR nya lebih rendah dari 1 per wanita. Hal ini dikarenakan penduduk yang terus menurun akibat fertilitas yang sangat rendah akan mengakibatkan proporsi produktif sangat banyak. Dengan kondisi ini maka akan dapat tercipta bonus demografi (*demographic dividend*), yang muaranya adalah kondisi kesejahteraan akan terwujud.

Di sisi lain, angka kematian di Kabupaten Sleman diproyeksikan terus naik dari tahun dasar 2015 sampai 2035. Total jumlah kematian yang terjadi pada 2015 mencapai 9.708 dan meningkat pesat menjadi 12.698 tahun 2035. Kenaikan angka kematian tersebut tercatat sebesar 30,8 persen selama jangka waktu 20 tahun atau rata-rata 1,5 persen per tahun. Berdasarkan jenis kelaminnya, kematian laki-laki di Kabupaten Sleman lebih tinggi daripada kematian perempuan. Pada tahun 2015 jumlah kematian laki-laki sebesar 5.316 jiwa dan terus naik sampai tahun 2035 dengan kematian sebesar 6.773 jiwa. Sedangkan untuk kematian perempuan, pada tahun 2015 jumlah kematiannya sebesar 4.392 jiwa dan pada tahun 2035 jumlahnya meningkat menjadi sebesar 5.925 jiwa. Tingginya jumlah kematian laki-laki dibandingkan dengan perempuan disebabkan oleh tingginya angka harapan hidup perempuan dibanding laki-laki. Pada 2035, angka harapan hidup perempuan sebesar 77,18 tahun dibandingkan dengan laki-laki sebesar 73,13. Hal ini menunjukkan risiko kematian perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta saja. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan prosesnya dapat terjadi di semua arah, di semua kecamatan. Patut disadari bahwa beberapa kecamatan yang berada di lereng Gunung Merapi memiliki tingkat urbanisasi yang rendah.

## **4.2 Kualitas Penduduk**

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dari sisi pendidikan target utama adalah angka melek huruf mencapai 100 persen. Hal ini didukung oleh angka partisipasi murni (APM) untuk SD mencapai 100 persen. APM untuk tingkat SLP diharapkan terus mencapai 100 persen, dengan memperhatikan trend selama 30 tahun terakhir.

## **4.3 Kondisi Keluarga**

Kondisi keluarga di Kabupaten Sleman yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang melaksanakan delapan fungsi keluarga secara maksimal. Delapan fungsi keluarga ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan tuntutan keluarga dalam menjalani roda-roda kehidupannya untuk mencapai keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial sebagai berikut.

- \* keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara
- \* keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut
- \* keluarga yang berketahanan sosial, yaitu.
  - keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga
  - keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia
  - keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya
  - keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku

#### **4.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk**

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, sehingga pertumbuhan penduduk positif dapat terjadi di Kabupaten Sleman. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi seperti Kecamatan Depok, Gamping, Godean, dan Mlati. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan.

## 4.5 Database Kependudukan

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang terpadu sesuai dengan kebutuhan
2. Tersusunnya sistem *database* kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat

Enam kategori isu-isu strategis :

1. Regulasi dan Kebijakan
2. Kelembagaan
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
5. NIK
6. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saling terkait satu sama lain.

Demikian pula untuk prioritas pemecahan masalah dari setiap isu-isu strategis tersebut.

Regulasi dan kebijakan yang berkenaan dengan kependudukan telah ada, tetapi masih perlu penjelasan yang lebih rinci, terutama untuk operasionalisasi regulasi dan kebijakan tersebut di daerah-daerah. Operasionalisasi regulasi dan kebijakan tersebut harus diiringi dengan *enforcement* dan pemberian sanksi bagi yang melanggar regulasi dan kebijakan. Disamping itu, regulasi dan kebijakan tersebut perlu secara sistematis disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan yang terkait dengan data kependudukan. Sosialisasi tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan cara menerjemahkan regulasi dan kebijakan kedalam bentuk-bentuk yang lebih operasional dan pembuatan alur kerja (*work flow*) tertib administrasi kependudukan. Pembuatan operasionalisasi alur kerja ini akan menjamin standarisasi pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). Regulasi

dan perundang-undangan serta standardisasi ini tidak akan dapat berjalan secara optimal jika sekiranya tidak didukung oleh kelembagaan yang baik.

Kelembagaan di lingkungan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tertata dengan baik. Semua fungsi SAK dan SIAK telah terbagi kedalam unit-unit yang ada. Setiap unit memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang terdefiniskan dengan jelas. Beberapa unit masih perlu menyinkronkan dan mengoordinasikan pelaksanaan tupoksinya. Disamping itu, perlu ditetapkan indikator kinerja setiap unit agar irama kerjasama antar unit dapat menghasilkan produk layanan yang optimal. Sementara itu, kelembagaan yang menangani SAK dan SIAK di daerah masih bervariasi. Ada daerah yang secara jelas dan tegas menetapkan Dinas Kependudukan untuk menangani SAK dan SIAK, tetapi masih ada daerah yang menetapkan penanganan SAK dan SIAK ini dibawah dinas yang lain walaupun jumlah hanya satu dua daerah saja. Untuk itu, perlu mendesak adanya standardisasi struktur organisasi penanganan SAK di daerah. Struktur organisasi yang menangani SAK dan SIAK, baik yang di pusat maupun yang di daerah, tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh SDM yang berkualitas.

SDM TIK yang menangani SAK dan SIAK seyogianya disusun berdasarkan hierarki kelembagaan yang mengelola SAK dan SIAK tersebut. Setiap tingkatan pada hierarki tersebut memerlukan kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu ditetapkan SDM yang sesuai dengan kompetensinya pada setiap unit. SDM ini secara terus-menerus perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik pengetahuan maupun keterampilannya dalam menangani SAK dan SIAK. Pelatihan untuk SDM ini perlu dilakukan secara berkala, terjadwal, dan berkelanjutan. Terutama untuk SDM TIK yang telah dilatih, mereka tidak boleh dimutasikan kebidang non-TIK, tetapi perlu disediakan jenjang karier yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar SDM TIK tersebut tetap dapat merespon perubahan-perubahan infrastruktur TIK yang sangat pesat.

Aplikasi SIAK itu tersendiri terdiri dari dua modul utama, yaitu modul pendaftaran penduduk dan modul pencatatan sipil. Setiap modul utama

tersebut dibagi lagi atas berbagai submodul yang digunakan, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu direviu sejauhmana aplikasi SIAK diterapkan, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Seharusnya, aplikasi SIAK tersebut mengalir mulai dari titik layanan kependudukan (kelurahan atau kecamatan), lanjut ke kabupaten/kota, dan pusat serta ke provinsi. Secara proporsional dan terdistribusi, aliran aplikasi SIAK ini harus disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Bersamaan dengan aplikasi SIAK tersebut, maka *database* kependudukan dapat dikonsolidasikan secara bertingkat.

NIK dan KTP elektronik adalah salah satu informasi identitas dan dokumen kependudukan sebagai keluaran dari aplikasi SIAK yang sangat penting dan berdampak luas. NIK, selain sebagai identitas penduduk Indonesia, juga merupakan kunci dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik. Ketunggalan NIK secara efektif dimulai sejak diterbitkannya kepada seorang menggunakan SIAK. Pada saat ini untuk menjamin autentitas NIK hanya digunakan dua faktor, yaitu faktor yang menyatakan *sesuatu yang Anda ketahui* dan faktor yang menyatakan *sesuatu yang Anda miliki*. Dalam rangka memastikan ketunggalan NIK, dilakukan konsolidasi antar-*database* kabupaten/kota, provinsi, dan nasional secara sistem tersambung (*on-line*). Pada saat bersamaan, setiap *database* kependudukan kabupaten/kota dimuktakhirkan untuk membersihkan unsur yang menjadikan NIK ganda, NIK yang tidak merepresentasikan pemiliknya, satu NIK dimiliki oleh dua orang, dan seterusnya dengan mekanisme konsolidasi secara *on-line* dan verifikasi 1 : N.

Dalam rangka meningkatkan ketunggalannya NIK seseorang, maka seluruh penduduk wajib KTP akan direkam *karakteristik yang melekat pada diri seseorang* berupa biometri seluruh sidik jari dan disimpan dalam *server database* sidik jari (AFIS). Sistem *database* ini terintegrasi *database* SIAK sehingga seseorang wajib KTP dapat diakses biodata termasuk NIK dan biometri sidik jarinya. KTP elektronik sebagai KTP ber-*chip* yang memuat

biodata, sidik jari, dan foto penduduk bersangkutan adalah upaya untuk meniadakan kepemilikan KTP palsu dan KTP ganda, serta kurangnya kepercayaan terhadap KTP bersifat nasional. Untuk itu, secara bertahap akan diterapkan KTP elektronik sesuai amanat Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang KTP Berbasis NIK Secara Nasional.

Infrastruktur TIK untuk mendukung kegiatan SAK dan SIAK akan terus berkembang dan berubah. Seringkali perkembangan dan perubahan TIK ini tidak sejalan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai. Dapat saja pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sekarang tidak berlaku lagi bagi TIK dimasa yang akan datang. Agar terjadi kesinambungan dalam penanganan infrastruktur TIK, maka perlu disusun suatu tata kelola TIK (*IT Governance*) untuk SAK dan SIAK. Tata kelola TIK ini menjamin TIK yang digunakan untuk SAK dan SIAK memberikan manfaat yang optimal bagi unit-unit yang menangani administrasi kependudukan. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, infrastruktur TIK, seperti *server*, jaringan internet, dan komputer pribadi, perlu di-*upgrade* secara berkala dan berkelanjutan. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan-*outsourc*e pengelolaan infrastruktur TIK ini agar SDM TIK yang menangani SAK dan SIAK dapat lebih fokus pada masalah-masalah yang substantif. Oleh karena itu, perlu dijalin kerjasama antara Ditjen Adminduk dengan penyedia jasa TIK, terutama untuk mendukung kegiatan aplikasi SIAK agar memberikan hasil yang optimal.

#### **4.6 Permasalahan dan Tantangan**

Kabupaten Sleman memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi di DI.Yogyakarta dan cenderung meningkat. Persoalan besar yang sampai saat ini masih penting untuk dikaji lebih jauh adalah mobilitas internal, dalam arti angka migrasi neto yang tinggi. Kedudukan Sleman yang strategis sebagai tempat pendidikan, berwisata, dan bermukim telah menyebabkan migrasi masuk pesat. Penduduk terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Arah urbanisasi terkesan tidak merata, cenderung ke daerah-daerah yang sudah padat penduduknya. Meskipun demikian karena daerah padat sudah tidak mampu lagi menampung, arah

permukiman di Kabupaten Sleman mulai merembet ke daerah-daerah pinggiran. Diproyeksikan jika tidak diawasi dan diperhatikan, maka pola persebaran penduduk di Kabupaten Sleman akan tidak terpola dan sulit diatur.

Bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatan kerja. Penduduk yang berada di usia angkatan kerja tersebut dapat menjadi potensi bagi Indonesia menjadi negara maju, tetapi juga dapat menjadi bumerang apabila kualitas sumber daya manusia usia produktif itu rendah. Modal untuk pembangunan adalah kualitas SDM. Salah satu tanda bonus demografi adalah angka ketergantungan di bawah 50 persen, artinya satu orang penduduk nonproduktif ditanggung oleh 1-2 orang penduduk usia produktif. Berdasarkan kelompok umur, penduduk dapat dibedakan atas tiga kategori, yaitu muda (0-14 tahun), menengah (15-64 tahun), dan tua (65 tahun ke atas).

Pengelompokan penduduk yang terkait dengan produktivitas secara ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi penduduk nonproduktif dan penduduk usia produktif. Penduduk nonproduktif terdiri dari penduduk yang berumur 0-14 tahun dan penduduk yang berumur 65 tahun. Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk diketahui angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sleman adalah sebesar 46 persen pada 2015. Angka tersebut menunjukkan bahwa 100 orang penduduk kelompok umur 15-64 tahun yang produktif menanggung sekitar 46 orang penduduk tidak produktif. Pada 2020 rasio ketergantungan tersebut menurun menjadi 43 persen, kemudian naik menjadi 44 persen tahun 2025. Rasio ketergantungan tersebut menunjukkan kenaikan lagi menjadi 46 persen tahun 2030 dan kembali naik menjadi 49 persen tahun 2035.

Beban ketergantungan merupakan indikator yang tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk muda, tetapi juga ditentukan oleh jumlah penduduk tua. Peningkatan derajat kesehatan yang sangat memadai pada titik tertentu akan berdampak pada membesarnya kelompok ini yang secara langsung akan meningkatkan angka beban ketergantungan penduduk usia produktif. Dengan kata lain, seiring dengan perjalanan waktu beban ketergantungan tidak

ditentukan oleh besarnya angka kelahiran, tetapi dengan meningkatnya derajat kesehatan.

Lansia yang panjang umur, sehat, dan tidak tergantung merupakan langkah yang harus dipersiapkan untuk menjemput penduduk “tua”. Penurunan kualitas fisik dan psikis lansia dapat disikapi secara bijak sehingga kelemahan yang ada dapat dimanfaatkan menjadi suatu modal pembangunan.

Hasil proyeksi menunjukkan persentase lansia di Sleman tahun 2015 mencapai 10,5 persen dan tahun 2020 sebesar 10,7 persen. Pada 2025 kembali meningkat menjadi 11,9 persen. Perkembangan berikutnya menunjukkan kenaikan semakin tinggi, yakni mencapai 13,4 persen tahun 2030 dan 15,5 persen tahun 2035. Jadi dalam rentang waktu 20 tahun ke depan, jumlah penduduk lansia di Sleman akan bertambah sebesar lima persen. Isu lansia di Sleman hendaknya memerlukan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk lanjut usia berimplikasi pada berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam membicarakan bonus demografi adalah kualitas penduduk usia “dewasa” atau produktif. Menyiapkan generasi muda yang berkualitas dari aspek pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama untuk membekali generasi muda melakukan kompetisi mendapatkan pasar kerja yang lebih berkualitas. Pengangguran terdidik dan peningkatan angkatan kerja perempuan di satu sisi, sedangkan di sisi yang lain lapangan pekerjaan yang semakin terbatas merupakan tantangan tersendiri bidang ketenagakerjaan. Satu hal yang perlu disikapi adalah besarnya jumlah penduduk usia kerja yang kemudian disebut dengan bonus demografi benar-benar merupakan jendela kesempatan dibidang ekonomi, bukan sebaliknya sebagai petaka yang menyertai ledakan penduduk usia kerja ini.

Pencapaian bonus demografi sangat tergantung kepada usaha pengaturan fertilitas. Memperhatikan kecenderungan perubahan angka fertilitas, baik dari hasil sensus penduduk maupun SDKI, tantangan terbesar di bidang kuantitas penduduk adalah tetap mempertahankan angka fertilitas pada

kisaran angka *replacement level* yaitu TFR sama dengan 2,1 per perempuan atau kurang sedikit daripada batas tersebut. Tantangan ke depan adalah mempertahankan TFR pada level rendah dan mewujudkan angka TFR pada spesifik angka 1,7 pada tahun 2035.

# **BAB V**

## **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**

### **5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk**

Pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Sleman dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program KB yang mengatur :

- (1) Usia ideal perkawinan,
- (2) Usia ideal melahirkan,
- (3) Jarak ideal melahirkan
- (4) Jumlah ideal anak yang dilahirkan.

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KB pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal berikut. :

- (1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan
- (2) Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu
- (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan
- (4) Peningkatan kesertaan KB pria
- (5) Promosi pemanfaatan air susu ibu.

Pengaturan fertilitas melalui program KB juga dilakukan dengan cara berikut :

- (1) Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di daerah,
- (2) Larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM
- (3) Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan
- (4) Perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya :

- (1) Penurunan angka kematian ibu hamil
- (2) Penurunan angka kematian ibu melahirkan
- (3) Penurunan angka kematian pasca melahirkan
- (4) Penurunan angka kematian bayi dan anak.

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan terpadu dengan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Di samping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada :

- (1) Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri)
- (2) Keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan
- (3) Pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian
- (4) Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, yaitu pertumbuhan penduduk yang terkendali dan pencapaian *windows of opportunity*, maka pengendalian angka kelahiran sangat penting. Untuk itu, diperlukan revitalisasi program KB dengan pendekatan pelaksanaan program KB perlu diubah orientasinya dari *supply* ke *demand side approach*.

**Strategi** yang dikembangkan adalah melakukan integrasi, desentralisasi, kemitraan, dan pemberdayaan serta fokus pada penduduk miskin. Integrasi adalah implementasi program KB ke dalam program pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Sementara itu, desentralisasi dilakukan melalui lima cara. **Pertama**, memberikan otoritas yang lebih besar kepada kabupaten dalam implementasi program KB, salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan. Tujuannya adalah melakukan sinkronisasi dan menghindarkan *overlapan* antar SKPD. Seperti telah diamanatkan dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, BKKBD (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah) perlu segera dibentuk. Pemerintah memfasilitasi pembentukan BKKBD dengan merevisi regulasi,

khususnya yang terkait dengan otonomi daerah, yang menghambat terbentuknya lembaga tersebut.

**Kedua**, melakukan pemberdayaan SDM di tingkat kabupaten dalam rangka *capacity building*.

**Ketiga**, memperkuat komitmen politik, khususnya di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan program KB.

**Keempat**, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program KB di tingkat kabupaten.

**Kelima**, mendelegasikan kewenangan operasional di tingkat kabupaten untuk memberikan otoritas yang lebih besar pada kabupaten dalam rangka mengembangkan program dan melaksanakannya berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah.

Sementara itu, **strategi** kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. **Tujuan strategi** ini adalah untuk lebih mengembangkan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program KB. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan *mutual benefits*. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antarpemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, nasional maupun internasional.

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran.

## 5.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Beberapa kebijakan pokok untuk meningkatkan kualitas penduduk adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup

2. Meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal
3. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan
4. Meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran dan setengah pengangguran.
5. Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan

**Strategi** peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Di samping itu, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk.

Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik.

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal: pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2035 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan

berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat.

Dengan memerhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. **Strategi** di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini telah terjadi pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi pada penyakit kronis dan degeneratif. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan *treatment* penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Di samping itu, sejalan dengan meningkatnya penyakit kronis dan degeneratif sebagai penyebab kematian orang dewasa, maka alokasi sumber daya kesehatan harus juga diarahkan untuk pencegahan dan *treatment* penyakit tersebut. Akan tetapi, dengan memerhatikan diversitas kondisi kesehatan antardaerah, terutama dalam hal penyakit, maka setiap strategi, sekali lagi, tidak dapat bersifat homogen atau tunggal, tetapi harus merespons kondisi spesifik setiap daerah.

Sementara itu, **strategi** penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut harus ditopang dengan pengembangan pelayanan prenatal maupun antenatal.

Dari sisi pendidikan, **strategi** yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan *gender gap* dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Karena di berbagai provinsi angka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas.

### 5.3 Pembangunan Keluarga

Pokok kebijakan pembangunan keluarga memuat kegiatan

- Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa;

- Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
- Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender;
- Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara
- Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Sasaran dari kebijakan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis.

Dalam upaya membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, **strategi** yang disuguhkan adalah pembangunan keluarga melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa mempunyai indikator keberhasilan yang dilihat dari hal berikut.

- keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing
- keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama
- keluarga yang memelihara kerukunan antarumat beragama

**Strategi** untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut.

- meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan
- meningkatkan peran kelembagaan keluarga
- komitmen Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan
- perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara
- perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat

Indikator keberhasilan dalam membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah.

- Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara.
- Keluarga dibangun dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, bukan perkawinan dengan sejenis kelamin.
- Keluarga dibangun dari perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan masyarakat.
- Setiap perkawinan tercatat di lembaga yang berwenang dengan dibuktikan oleh kepemilikan akta nikah.

Beberapa **strategi** untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri adalah sebagai berikut.

1. peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal

**Strategi** ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

2. pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)

3. pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik

4. pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.

**Strategi** ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan.

**Strategi** yang digunakan adalah penyadaran melalui pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Indikator keberhasilannya adalah keluarga yang berketahanan sosial, berwawasan ke depan (menguasai iptek),serta berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara (berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan).

**Strategi** yang dapat dilakukan adalah untuk membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen

sumberdaya keluarga. Kegiatan lainnya adalah dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumahtangga, manajemen stres, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga.
2. Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka *drop-out* menurun.

3. Keluarga mempunyai perencanaan keuangan.

Hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank, dan perencanaan membeli rumah.

#### **5.4 Pengarahan Mobilitas Penduduk**

Pengarahan mobilitas penduduk yang didorong dan mendukung pembangunan pembangunan daerah yang berkeadilan Strategi mencapai tujuan-tujuan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk sebagai berikut.

- menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis
- memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para migran internasional dan keluarganya
- menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu
- memperluas kesempatan kerja produktif
- menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran
- meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahan mobilitas penduduk perlu dilakukan mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi

disemua kabupaten/kota. Untuk tercapainya tujuan-tujuan pengarahannya mobilitas penduduk tersebut, maka perlu sejak awal dipastikan bahwa perda, dan berbagai aturan pelaksana lainnya telah dapat diselesaikan. Beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tujuan itu adalah sebagai berikut.

- a. kebijakan mobilitas penduduk nonpermanen
- c. penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah
- d. pengarahannya mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga
- e. pedoman pengelolaan urbanisasi di perkotaan
- f. pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk. Sementara itu, pada tataran perda, dibutuhkan adanya perda tentang kebijakan mobilitas penduduk.

## 5.5 Pembangunan Database Kependudukan

Kebijakan umum pembangunan data base kependudukan dilakukan dengan mengembangkan data base kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

*Update database* kependudukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dilakukan secara regular melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara regular juga. Terbangunnya *database* kependudukan berbasis NIK secara nasional akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. *Database* kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh berbagai pihak yang

membutuhkan. *Database* kependudukan juga dapat digunakan untuk kepentingan pemilu dan pilkada, baik itu melalui data kependudukan yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi dengan bimoterik dalam program e-KTP.

## **BAB VI**

# **ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**

Pembangunan kependudukan dan keluarga berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis SIAK yang akurat, terpercaya, terintegrasi dan termanfaatkan. Berdasarkan ketersediaan data yang lengkap tersebut maka dilakukan pengendalian kuantitas, pembangunan kualitas, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman akan mendukung seluruh rangkaian pembangunan dalam mewujudkan penduduk yang berkualitas, sejahtera, maju, mandiri, berkelanjutan, dan berbudaya.

### **6.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk**

*Roadmap Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Sleman ini mencakup kurun waktu 2015 sampai dengan 2035 dengan periode lima tahunan. *Roadmap* dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan *roadmap* ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Tahun dasar yang dipergunakan dalam menyusun Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah tahun 2015, sesuai dengan data SIAK dan data pendukung lainnya. Perkiraan kondisi kependudukan terkait dengan indikator kuantitas dilakukan berdasarkan proyeksi penduduk.

Pada tahun 2015 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indikator kependudukan adalah sebagai berikut:

Penduduk:

Total = 1.063.448 jiwa

Laju pertumbuhan = 0,69 Persen

Fertilitas:

Total fertility rate (TFR) = 1,8 anak per wanita usia subur

Net reproduction rate (NRR) = 0,87

Crude birth rate (CBR) = 13,7 kelahiran per 1000 penduduk

Pada tahun 2020 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indikator kependudukan adalah sebagai berikut:

Penduduk:

Total = 1.099.384 jiwa

Laju pertumbuhan = 0,65 persen

Fertilitas:

Total fertility rate (TFR) = 1,77 anak per wanita usia subur

Net reproduction rate (NRR) = 0,85

Crude birth rate (CBR) = 13 kelahiran per 1.000 penduduk

Pada tahun 2025 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indikator kependudukan adalah sebagai berikut:

Penduduk:

Total = 1.132.016 jiwa

Laju pertumbuhan = 0,61 persen

Fertilitas:

Total fertility rate (TFR) = 1,75 anak per wanita usia subur

Net reproduction rate (NRR) = 0,84

Crude birth rate (CBR) = 12,4 kelahiran per 1000 penduduk

Pada tahun 2030 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indikator kependudukan adalah sebagai berikut:

Penduduk:

Total = 1.159.190 jiwa

Laju pertumbuhan = 0,57 persen

Fertilitas:

Total fertility rate (TFR) = 1,73 anak per wanita usia subur

Net reproduction rate (NRR) = 0,83

Crude birth rate (CBR) = 11,7 kelahiran per 1000 penduduk

Pada tahun 2035 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indikator kependudukan adalah sebagai berikut:

Penduduk:

Total = 1.177.141 jiwa

Laju pertumbuhan = 0,52 persen

Fertilitas:

Total fertility rate (TFR) = 1,7 anak per wanita usia subur

Net reproduction rate (NRR) = 0,82

Crude birth rate (CBR) = 11 kelahiran per 1000 penduduk

**Tabel 6.1**  
**ROADMAP PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK**  
**KABUPATEN SLEMAN, TAHUN 2015-2035\*)**

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
1	Jumlah	1.063.448	1.099.384	1.132.016	1.159.190	1.177.141
2	LPP		0,65	0,61	0,57	0,52
3	TFR	1,8	1,77	1,75	1,73	1,7
4	NRR	0,87	0,85	0,84	0,83	0,82
5	CBR	13,7	13,0	12,4	11,7	11,0
6	CPR	79,3	81,1	82,8	83,4	85,0

*Keterangan:*

\*) Data dasar TFR 2015 = 1,80 (Data Dinas Kesehatan Sleman, 2014)

Skenario sedang dengan asumsi TFR 2035 = 1,70

\*) CPR (*Contraceptive Prevalency Rate*) Sleman tercatat tahun 2013 mencapai 79,31 dan tahun 2014 sebesar 79,09. Diharapkan pada 2035 CPR Sleman dapat ditingkatkan menjadi 85,0.

## 6.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Sebagaimana tersebut di dalam teori mutu modal manusia, bahwa kualitas manusia ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah faktor yang penting dalam mendukung produktivitas manusia. Oleh karena itu, terkait dengan *road map* kualitas penduduk di Kabupaten Sleman, maka dikelompokkan dalam tiga indikator pokok yakni indikator pendidikan, indikator kesehatan dan indikator ekonomi.

*Roadmap* Indikator Pendidikan di Kabupaten Sleman 2015 - 2035 tersaji pada Tabel 6.2

**Tabel 6.2.**

### **ROADMAP INDIKATOR PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2035\*)**

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
1	Angka Melek Huruf (%)	96,72	99,25	100,0	100,0	100,0
2	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,65	10,91	11,16	11,42	11,67
3	Angka Partisipasi Sekolah Murni pada Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat (%)	58,73	63,74	68,79	73,84	78,89
4	Indeks Pendidikan dalam IPM (%)	87,25	88,75	90,25	91,75	93,25

*Keterangan:*

\*) Data dasar Angka Melek Huruf 2013 = 95,11 persen (Data BPS Sleman, 2014)

Skenario menurun sesuai pola pada tahun-tahun sebelumnya.

\*) Data dasar Rata-Rata Lama Sekolah 2013 = 10,55 persen (Data BPS Sleman, 2014)

Skenario menurun sesuai pola pada tahun-tahun sebelumnya.

\*) Data dasar Indeks Pendidikan 2013 = 86,85 persen (Data BPS Sleman, 2014)

Skenario menurun sesuai pola pada tahun-tahun sebelumnya.

Road map Indikator Kesehatan di Kabupaten Sleman 2015 - 2035 tersaji pada Tabel 6.3

**Tabel 6.3**  
**Roadmap Peningkatan Kualitas Kesehatan**  
**Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2015-2035\*)**

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
1	CDR	9,1	9,0	9,2	9,7	10,8
2	IMR	4,65	4,15	3,60	3,0	3,0
3	MMR	83,3	87,3	71,1	64,6	60,0
4	E <sup>0</sup> (tahun)	76,18	76,33	76,58	76,83	77,08
5	Indeks Kesehatan dalam IPM (%)	85,0	86,5	88,0	89,5	90,5

Keterangan:

- \*) IMR Sleman tercatat tahun 2013 mencapai 4,57 dan tahun 2014 sebesar 4,65 per 1.000 kelahiran hidup. Diharapkan sampai dengan tahun 2035 IMR Sleman dapat ditekan sampai dengan 3,0
- \*) MMR Sleman tercatat tahun 2013 mencapai 63,27 dan tahun 2014 sebesar 83,29 per 100.000 kelahiran hidup. Diharapkan pada 2035 MMR Sleman dapat diturunkan pada angka kisaran 60,0.

Roadmap Indikator Ekonomi di Kabupaten Sleman 2015 - 2035 tersaji pada Tabel 6.4

**Tabel 6.4**  
**Roadmap Peningkatan Kualitas Ekonomi**  
**Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2015-2035\*)**

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
1	Konsumsi Riil per kapita (000)	700,00	710,5	721,0	731,5	741,0
2	Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	11,05	7,05	3,00	3,00	3,00
3	Angka Ketergantungan Penduduk Tidak Produktif Terhadap Penduduk Produktif	46	43	44	46	49
4	Indeks Pendapatan dalam IPM (%)	68,8	70,8	72,9	75,0	77,1

Keterangan:

- \*) Data dasar yang digunakan untuk memperkirakan indikator pada 2015 - 2035 bersumber dari BPS Kabupaten Sleman dan dokumen terkait lainnya.

### 6.3 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Adapun kegiatan untuk setiap periode adalah sebagai berikut.

**Tabel 6.5**  
**Roadmap Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sleman Tahun 2015- 2035**

POKOK KEBIJAKAN	2015-2019	2019-2024	2025-2029	2030-2035
1. Membangun keluarga berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Ketuhanan yang Maha Esa	xxxx (Tahun 1 - 4)	xxxxx (Tahun 1 - 5)	xxxxx (Tahun 1 - 3)	xxxxx (Tahun 1 - 5)
2. Membangun keluarga sejahtera, sehat,maju, mandiri, dengan jumlah anak ideal dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan gender	xxx (Tahun 3 - 5)	xxx (Tahun 3 - 5)	xxxx (Tahun 2 - 5)	xxxxx (Tahun 1 - 5)
3. Membangun keluarga yang berketahanan sosial, memiliki perencanaan sumber daya keluarga, berwawasan nasional dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara	xxxxx (Tahun 1 - 5)			

#### 6.4 Pengarahan Mobilitas Penduduk

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas internal dan internasional. Pasal 16A PP No. 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau non permanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota, mobilitas penduduk antar kabupaten/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antar kabupaten/kota antar provinsi. Pasal 16B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah.

Pasal 16J menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk, pemerintah daerah provinsi pengumpulan dan analisis data-data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem *database* dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan pengarahan mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahan mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahan mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Sebagai arahan kebijakan, berikut adalah Pokok-Pokok *Roadmap* Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Sleman 2015-2035.

**Tabel 6.6**  
***Roadmap* Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sleman**  
**Tahun 2015– 2035**

POKOK KEBIJAKAN	2015- 2019	2019- 2024	2025- 2029	2030- 2035
1. Pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan menjadi pusat agrobisnis yang didukung oleh industri rumah dalam upaya mendukung kedudukan Kabupaten Sleman sebagai kabupaten sebagai pusat Pendidikan dan Pariwisata	xxxxx (Tahun 1 - 5)	xxxxx (Tahun 1 - 5)	xxxxx (Tahun 1 - 5)	xxxx (Tahun 1 - 4)
2. Peningkatan kerja sama antardaerah dalam mengatur migrasi internal yang harmonis dan berwawasan lingkungan	xxxxx (Tahun 1 - 5)			
3. Penyusunan Sistem Informasi Penduduk Luar Domisili secara transparan dan terpadu	xxxxx (Tahun 1 - 5)	xxxx (Tahun 1 - 4)	xxx (Tahun 1 - 3)	xx (Tahun 1 - 2)
6. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan penduduk lokal dengan pendatang	xxxxx (Tahun 1 - 5)			

7.	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di perdesaan dalam upaya mengurangi konsentrasi penduduk di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta	xxx (Tahun 1 - 3)	xxx (Tahun 1 - 3)	xx (Tahun 1 - 2)	xx (Tahun 1 - 2)
8.	Pengarahan dan fasilitasi mobilitas penduduk melalui program Transmigrasi Professional	xxxx (Tahun 1 - 4)	xxxxx (Tahun 1 - 5)	xxxxx (Tahun 1 - 5)	xxxxx (Tahun 1 - 5)
9.	Pengembangan migrasi internasional melalui G to G program demi meningkatkan kualitas SDM yang berstandar internasional	xxxxx (Tahun 1 - 5)	xxxxx (Tahun 1 - 5)	xxxxx (Tahun 1 - 5)	xxxx (Tahun 1 - 4)

## 6.5 Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan

Pada prinsipnya *roadmap* pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari *Decision Support System (DSS)*.

Sebagai arahan kebijakan, berikut adalah Pokok-Pokok *Roadmap* Pembangunan data dan Informasi Kependudukan di Kabupaten Sleman 2015-2035.

**Tabel 6.7**  
***Roadmap* Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Sleman, Tahun 2015- 2035**

POKOK KEBIJAKAN	2015- 2019	2019- 2024	2025- 2029	2030- 2035
1. Mewujudkan tersedianya data administrasi kependudukan yang berbasis SIAK yang akurat, terpercaya, termanfaatkan dan terintegrasi sebagai basis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman	xxx (Tahun 1 - 3)	xxxx (Tahun 1 - 4)	xxxxx (Tahun 1 - 5)	xxxxx (Tahun 1 - 5)
2. Periode pelayanan prima administrasi kependudukan.	xxxxx (Tahun 1 - 5)			
3. Periode pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-base society)	xxx (Tahun 1 - 3)	xxx (Tahun 1 - 3)	xxxx (Tahun 1 - 4)	xxxxx (Tahun 1 - 5)

<p>4. Periode integrasi antar pemangku kebijakan dalam mewujudkan sistem informasi kependudukan terpadu, dari berbagai sumber, ke dalam suatu database yang dapat diakses secara mudah oleh berbagai pihak.</p>	<p>xxx (Tahun 1 - 3)</p>	<p>xxx (Tahun 1 - 3)</p>	<p>xxxxx (Tahun 1 - 5)</p>	<p>xxxxx (Tahun 1 - 5)</p>
<p>5. Periode peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai DSS (Decision Support System).</p>	<p>xxx (Tahun 1 - 3)</p>	<p>xxx (Tahun 1 - 3)</p>	<p>xxxx (Tahun 1 - 4)</p>	<p>xxxxx (Tahun 1 - 5)</p>

## **BAB VII PENUTUP**

Penduduk adalah titik sentral pembangunan, karena di samping sebagai subyek (pelaku) pembangunan, penduduk sekaligus adalah obyek (penerima) hasil pembangunan. Kebijakan pembangunan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini, dan sekaligus juga mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang.

Tantangan besar persoalan kependudukan di Kabupaten Sleman adalah laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi yang belum didukung oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. Penting untuk mewujudkan keselarasan potensi bonus demografi dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Kunci utama untuk mewujudkannya terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sleman diarahkan pada terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing, dan berbudaya.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana hingga tahun 2035 melalui komponen pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas, dan pembangunan basis data kependudukan yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi. Muaranya adalah upaya peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Sleman baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sleman. 2015. *Proyeksi Penduduk Kabupaten Sleman 2015-2035*. Sleman: Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sleman
- Iskandar, I. 1977. *Demografi Teknik*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Swanson, D. A. and Siegel, J.S. 2004. *The Methods and Materials of Demography Second Edition*. London: Elsevier Academic Press.
- Tukiran, 2010. *Kependudukan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.